

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT sehingga Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) dapat menyelesaikan Laporan Tahun 2019. Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja Badan PPSDMP dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran

tahun 2019 dengan membandingkan target yang telah disusun dengan capaiannya dan realisasinya. Laporan ini sekaligus menjelaskan kendala dan permasalahan serta upaya-upaya penyelesaiannya.

Secara umum, target Program tahun 2019 dapat dicapai dengan baik, bahkan dalam kegiatan tertentu mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sehingga beberapa kegiatan belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini menjadi catatan bagi Badan PPSDMP untuk dapat menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan perbaikan kinerja dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan program dan anggaran tahun berikutnya.

Sistematika laporan terbagi dalam 6 (enam) bab, yaitu Bab I berisi Pendahuluan, Bab II menguraikan Organisasi dan Tata Kerja, Bab III menguraikan Program, Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan, Bab IV menguraikan Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut, Bab V Kesimpulan dan Saran serta Bab VI berisi Penutup.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2019 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan sumbang saran dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) demi dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan sangat di harapkan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Kami berharap, laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Badan PPSDMP pada masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2020

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr NIP. 1964062311989031002

i

DAFTAR ISI

		Halamar
KATA PE	NGANTAR	. i
DAFTAR	ISI	. ii
DAFTAR	TABEL	. iii
DAFTAR	GAMBAR	. iv
BAB I.	PENDAHULUAN	. 1
	A. Latar Belakang B. Tujuan C. Output	. 22
BAB II.	ORGANISASI	
	A. Dasar Hukum dan Organisasi B. Keragaan Sumber Daya Manusia	
BAB III.	RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN A. Program B. Rencana Anggaran dan Kinerja C. Perkembangan Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2015 – 2019 Badan PPSDMP	. 32 . 33 76
BAB IV.	PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT	. 79
	A. PrmasalahanB. Upaya Tindak Lanjut	79 81
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	85
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	87
BAB VI.	PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.	Komposis Alokasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2019	33
Tabel 2.	Rencana Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2019	34
Tabel 3.	Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2019	37
Tabel 4.	Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2019	39
Tabel 5.	Capaian Anggaran Pendidikan Pertanian (Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian dan Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP) Tahun 2019	41
Tabel 6.	Capaian Anggaran Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Tahun 2019	44
Tabel 7	Rencana Kinerja dan Target Sasaran Badan PPSDMP Tahun 2019	45
Tabel 8.	Capaian Kinerja Pemantapan sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2019	52
Tabel 9.	Capaian Kinerja Pemantapan sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2019	56
Tabel 10.	Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian (Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian) Tahun 2019	68
Tabel 11.	Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian (Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP Tahun 2019	
	GI CHILL I TUITUIT ZOTO	70

Tabel 12.	Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2019	74
Tabel 13.	Tingkat Efiensi Kegiatan Badan PPSDMP tahun 2019	75
Tabel 14.	Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019	77

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Komposisi Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan	30
Gambar 2.	Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Gambar 3.	Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2019	33
Gambar 4.	Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2019	38
Gambar 5.	Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2019	40
Gambar 6.	Capaian Anggaran Pendidikan Pertanian (Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian dan Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP) Tahun 2019	42
Gambar 7.	Capaian Anggaran Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Tahun 2019	44
Gambar 8.	Realisasi Kinerja Pusat Pemantapan sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2019	53
Gambar 9.	Realisasi Kinerja Pemantapan Sistem Penyuluhan Tahun 2019	56
Gambar 10.	Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian (Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian) Tahun 2019	00
Gambar 11.		69 71
Gambar 12.	Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2019	74
Gambar 13.	Tingkat Efiensi Kegiatan Badan PPSDMP Tahun 2019	76
Gambar 14.	Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019	78

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Struktur Organisasi Badan PPSDMP	80
Lampiran 2.	Data Kepegawaian Badan PPSDMP	81
Lampiran 3.	Data Jabatan Fungsional	82

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) tahun 2015-2019 adalah: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Agenda prioritas di bidang pertanian berdasarkan rincian dari 9 Agenda Nawa Cita, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang didukung dengan: (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2015 – 2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan visi Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka mewujudkan visi maka misi Kementerian Pertanian adalah: (1) Mewujudkan kedaulatan pangan; (2) Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan; (3) Mewujudkan kesejahteraan petani; (4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM Pertanian, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian menjadi tugas fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP).

Selaras dengan visi dan misi pembangunan pertanian yang ditetapkan Kementerian Pertanian dan sesuai dengan tugas fungsi, Badan PPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu: "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani".

Upaya pencapaian visi Badan PPSDMP tersebut, dilakukan melalui misi, yaitu:

- Memperkuat Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan;
- 2. Memperkuat Sistem Pendidikan yang Kredibel;
- 3. Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing;
- 4. Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel.

Sejalan dengan visi dan misi BPPSDMP, tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tahun 2015 - 2019 adalah:

- 1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani;
- 2. Menghasilkan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda yang kompeten dan berdaya saing;
- 3. Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional pertanian dan non aparatur pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian;
- 4. Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian

yang berdaya saing dan bermartabat;

5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi dan manajemen.

Arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tahun 2015 - 2019 adalah:

- Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat BP3K dan WKPP;
- 2. Peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat;
- 3. Revitalisasi STPP dan SMKPP serta sertifikasi profesi pertanian;
- 4. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan PPSDMP tahun 2019 adalah (1) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, serta (2) Program Pendidikan Pertanian. Mengacu kepada Program tersebut, maka pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 Badan PPSDMP adalah melalui kegiatan:

- 1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian;
- 2. Pendidikan Pertanian;
- 3. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
- 4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dan didukung dengan program UPSUS dan KSTM.
 - 1) Program (UPSUS)

Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor 03/Permentan/0T.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya telah menetapkan upaya khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai

Program UPSUS sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, pemerintah telah menetapkan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan yang harus dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun. pencapaian swasembada berkelanjutan tersebut diperlukan upaya peningkatan produksi yang luar biasa. Oleh karena itu diperlukan perhatian dari berbagai pihak, mengingat banyak kendala harus diatasi dan berbagai tantangan harus diantisipasi.

Upaya peningkatan produksi PAJALE terus digulirkan pemerintah pusat. Melalui program Upsus tiga komoditas utama padi jagung kedelai (pajale), pemerintah Presiden Jokowi sangat bertekad untuk mensukseskan kedaulatan pangan dalam 3 tahun ini, yaitu pada tahun 2019. Pada kegiatan Upsus pajale, segala strategi dan upaya dilakukan untuk peningkatan luas tanam dan produktivitas di daerahdaerah sentra produksi pangan. Upsus Pajale juga mengupayakan penyediaan dan distribusi pangan terjamin di seluruh Indonesia.

Operasionalisasi pencapaian target di lapangan benar-benar dilaksanakan secara baik untuk mensukseskan program yaitu dengan penyediaan dana, pengerahan tenaga, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, bantuan pupuk, ketersedian benih unggul yang tepat (jenis/varietas, jumlah, tempat, waktu, mutu, harga), bantuan traktor dan alsintan lainnya yang mendukung persiapan, panen dan pasca panen termasuk kepastian pemasarannya. Program Upsus dilaksanakan serentak di 31 provinsi di Indonesia.

Tentu sangat banyak faktor yang dapat mempengaruhi produksi pangan nasional, salah satu di antaranya adalah pendampingan dan pengawalan. Pengawalan dan pendampingan menjadi unsur penting dalam menggerakkan para petani untuk dapat menyiapkan teknologi. Pengawalan dan pendampingan ini, tidak hanya dilakukan oleh para penyuluh (PNS dan THL) dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) saja, melainkan mahasiswa dan penyuluh swadaya (petani) pun dilibatkan. Babinsa Penyuluh, dan mahasiswa merupakan salah penggerak bagi para petani sebagai pelaku utama karena dapat berperan sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator dan dinamisator. Kegiatan pengawalan dan pendampingan inilah yang selanjutnya disebut sebagai kegiatan UPSUS (Upaya Khusus) peningkatan produksi tiga komoditas PAJALE (Pajale) dalam upaya pencapaian swasembada berkelanjutan.

Dukungan dari TNI Angkatan Darat juga diperoleh dengan ditandatanganinya MOU antara Menteri Pertanian RI dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bahwa seluruh Babinsa akan membantu petani agar program swasembada pangan ini dapat

terwujud pada tahun 2017. Dukungan dari jajaran TNI ini telah diwujudkan sejak persiapan pertanaman sampai pengawalan benih dan pupuk. Pelatihan singkat diberikan kepada para Babinsa oleh para pakar yaitu penyuluh, para peneliti dari Dinas Pertanian dan Balitbangtan untuk memudahkan operasionalisasi mereka di lapangan.

(BEKERJA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Kementerian Pertanian membuat gebrakan baru guna mengentaskan kemiskinan di desa, dengan meluncurkan Program "Bekerja" atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Program ini akan menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten dengan harapan secara agregat angka kemiskinan bisa ditekan sesuai dengan target pemerintah, menjadi satu digit atau di bawah 10 persen pada 2019.

"Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Program Bedah Kemiskinan ini adalah bagian program padat karya tunai, berbasis pada pertanian. Sektor pertanian harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin sudah turun signifikan dari 10,96 persen (27,73 juta orang) pada September 2014, menjadi 10,12 persen atau 26,58 juta orang di September 2017.

Dengan skenario optimistis, dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan desa dapat diturunkan menjadi 9,92 persen. Dengan kata lain, pada 2022, satu juta rumah tangga miskin dapat terentaskan kemiskinan dari posisi saat ini, yakni 3,6 juta rumah tangga.

Menteri Pertanian menegaskan program tersebut harus dapat menjadi solusi permanen pengentasan kemiskinan dengan menyasar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. "Untuk jangka pendek, tanaman sayuran bisa menjadi solusi karena tiga bulan sudah bisa panen. Untuk jangka menengah kita berikan ayam dan kambing, karena ayam, misalnya sudah bisa bertelur di enam bulan. Sementara untuk jangka panjang tanaman keras,

seperti mangga dan salak. Lewat Program Bekerja ini, setiap rumah tangga miskin akan menerima bantuan 50 ekor ayam, 3 ekor kambing atau domba, 5 ekor kelinci beserta kandang dan pakan selama 6 bulan, 2-3 batang bibit mangga/manggis/durian/pisang/pepaya, 2-3 batang bibit kopi/kakao/pala/lada, dan 10 batang bibit cabai atau bawang merah.

"Secara khusus, Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran untuk menyediakan 10 juta ekor ayam. Program Bekerja memanfaatkan pekarangan masyarakat secara intensif untuk pertanian.

Terkait dengan efektivitas distribusi program, Kementerian Pertanian memperhatikan agro-climate, kultur tanaman, serta keunggulan komparatif, yang dimiliki setiap daerah. Hal ini bertujuan agar Program Bekerja bisa mewujudkan klaster ekonomi yang fokus, sehingga bisa menopang skala industri di daerah. Pada setiap klaster ekonomi dikembangkan usaha hulu (produksi) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran).

Untuk memastikan program tersebut bisa tepat sasaran, Kementerian Pertanian membentuk tim yang langsung turun ke lapangan untuk penerapannya. Terdapat sejumlah provinsi prioritas sebagai awal, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. "Menggunakan data yang sudah ada. Kementerian Pertanian akan fokus pada mereka yang benar-benar membutuhkan, karena datanya sudah ada.

2) PENINGKATAN KOMPETENSI DAIAM RANGKA PENUMBUHAN KETOMPOK SANTRI TANI MITENIAL DI BIDANG PERTANIAN (KSTM)

Organisasi Kegiatan Peningkatan Kompetensi dalam rangka Penumbuhan Kelompok Satri Tani Milenial di Bidang Pertanian mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 185/KPfS/OT.O5O/M/3/2019 tentang Penanggungjawab Kegiatan Penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial Tahun 2019

Meningkatnya minat generasi muda pada sektor pertanian

memberikan peluang untuk mendorong percepatan pembangunan pertanian. Salah satu sasaran yang potensial untuk ditumbuhkan minatnya adalah santri yang berada di pondok pesantren. Berdasarkan data dari Kementerian Agama (Februari, 2019) jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 24.515 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 3.598.950 orang. Potensi tersebut dapat mendorong para santri untuk berkontribusi aktif di bidang pertanian dalam rangka mendukung Program Pembangunan Pertanian.

Peningkatan minat santri di bidang pertanian dapat dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi Santri Tani Milenial bidang pertanian. Santri tani diharapkan tergabung dalam Kelompok Santri Tani Milenial IKSTMI sebagai media organisasi pembelajaran di bidang pertanian dan dapat mengimplementasikan hasil bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti dalam bentuk beternak ayam di pondok pesantren.

Tujuan dari peningkatan kompetensi daiam rangka penumbuhan ketompok santri tani mitenial di bidang pertanian (KSTM), adalah:

- 1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap santri tani milenial.
- 2) Memberikan kesempatan kepada santri tani milenial untuk mempelajari bidang pertanian melalui pendekatan kelompok.

Pengertian di dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Santri Tani Milenial adalah santri yang memiliki minat di bidang pertanian dan adaptif terhadap teknologi digital.
- 2) Kelompok Santri Tani Milenial yang selanjutnya disebut KSTM adalah kumpulan santri tani milenial yang berada di pondok pesantren, beranggotakan 20 -30 orang dan bersedia mengelola kegiatan di bidang pertanian secara bersama-sama.

Peningkatan kompetensi santri tani milenial di bidang pertanian dilaksanakan dalam rangka mengenalkan santri tani dengan dunia pertanian serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap santri khususnya dalam beternak ayam. Peningkatan kompetensi santri tani dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek). Tahapan pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Santri Tani Milenial

tersebut, adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan Soeialisasi
 Penanggung Jawab kegiatan melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan kepada instansi/dinas terkait yang menangani fungsi peternakan di provinsi dan kabupaten/kota, pondok pesantren calon penerima manfaat, dan stakeholder terkait lainnya.
- 2) Identifikasi Calon Petani Calon [,okasl (CPCL) KSTM
 - a. Satuan Kerja (Satker) Pelaksana di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota (Pormat 1) melakukan identifikasi dan inventarisasi KSTM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan mengacu pada database Pondok Pesantren dari Kementerian Agama.
 - b. Identifikasi dan inventarisasi CPCL KSTM penerima manfaat dilaksanakan oieh Pelaksana kegiatan Peningkatan Kompetensi dalam rangka Penumbuhan KSTM (Format 2) dengan mengacu pada Daftar Alokasi
- Propinsi, Kabupaten, dan KSTM Penerima Manfaat Tahun 2019 (Format 1). Adapun kriteria KSTM sebagai berikut:
 - a. KSTM beranggotakan 20 3O orang santri tani yang berada pada pondok pesantren serta memiliki minat untuk beternak ayam.
 - b. Usia santri tani yang tergabung dalam KSTM berkisar antara
 15 39 tahun dan/atau yang berjiwa milenial dan adaptif terhadap teknologi informasi.
- 4) Hasil identifikasi CPCL KSTM selanjutnya direkapitulasi per kabupaten (Format 3) dan ditandatangani oleh Kepala Bidang yang menangani fungsi peternakan atau Kanwil Kementerian Agama di tingkat Kabupaten dan Satker UPT BPPSDMP.

Selain dari 4 kegiatan Badan PPSDMP juga melaksanakan kegiatan dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari IFAD (International Fund for Agriculture Development) (1) IPDMIP, (2) READSI, (3) YESS, dan (4) SIMURP:

1) IPDMIP

KEGIATAN PROYEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN IRIGASI PARTISIPATIF TERINTEGRASI (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT/IPDMIP)

Pemerintah Indonesia. International **Funds** for Agricultural Development (IFAD) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah bekerja sama untuk mendukung Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP). Proyek ini dirancang untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai swasembada beras. Untuk itu, diperlukan upaya yang besar untuk meningkatkan produktivitas padi. Peran irigasi sangat penting untuk meningkatkan produksi padi. Sayangnya, saat ini sebanyak 7,2 juta hektar daerah irigasi dan setengah dari sarana irigasi yang ada memerlukan perbaikan. Untuk mencapai target swasembada, prioritas Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui: (a) revitalisasi penyuluhan pertanian dan produksi (b) peningkatan irigasi melalui rehabilitasi bendunganbendungan utama dan 3 juta ha jaringan irigasi;(c) pengelolaan irigasi yang lebih baik; (d) peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi;(d) penerapan pengelolaan irigasi partisipatif di tingkat provinsi/ kabupaten/kota; (e) pembangunan 1 juta ha jaringan irigasi baru di luar Jawa dan Bali; dan (f) pembangunan waduk-waduk besar di wilayah hulu.

IPDMIP dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan produktivitas pertanian, serta kemiskinan di mengurangi pedesaan. mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi. IPDMIP meningkatkan nilai pertanian irigasi berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan sumber penghidupan di perdesaan. Proyek ini mengadopsi pendekatan penetapan sasaran yang inklusif di daerah irigasi sehingga menguntungkan semua petani demikian, IPDMIP aktif. Namun menggunakan penetapan sasaran yang mempertimbangkan tingkat kemiskinan yang ada untuk menjangkau rumah tangga yang paling termarginalkan (misalnya: miskin, perempuan, pemuda, petani di daerah hilir, daerah-daerah dengan irigasi yang kurang memadai).

IPDMIP menjangkau 900.000 rumah tangga sasaran yang terdiri atas 4 juta penerima manfaat dengan cakupan wilayah seluas 450.000 ha di 16 provinsi (5 provinsi di Sumatera; 4 provinsi di Jawa; 2 provinsi di Kalimantan, 3 provinsi di Sulawesi; 2 provinsi di Nusa Tenggara), dan 74 kabupaten. IPDMIP mengutamakan rehabilitasi sistem irigasi yang dipasok oleh waduk di daerah-daerah yang selama ini belum mendapat bantuan. Periode pelaksanaan proyek dimulai pada tahun 2017 selama 6 tahun dan akan selesai pada tahun 2022.

Tujuan keseluruhan (Goal) dari Proyek IPDMIP adalah meningkatkan Ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat perdesaan. Tujuan Proyek IPDMIP adalah meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan.

Output Proyek yang utama meliputi: 1) penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan untuk pertanian irigasi; 2) perbaikan pengelolaan sistem irigasi; 3) perbaikan infrastruktur sistem irigasi; dan 4) peningkatan pendapatan pertanian irigasi.

Proyek IPDMIP memiliki memiliki 4 (empat) komponen yaitu: 1) Komponen Penguatan Kerangka Kerja Kebijakan 1 : Kelembagaan Irigasi Pertanian dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, BAPPENAS dan Kemendagri di tingkat Nasional dan BAPPEDA di tingkat daerah. Komponen ini dibiayai oleh Pemerintah Indonesia, IFAD (hibah), dan ADB; 2) Komponen 2 : Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kemendagri, dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan ADB; 3) Komponen 3: Peningkatan Infrastruktur Irigasi dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan ADB; 4) Komponen 4 : Peningkatan Pendapatan Pertanian dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan IFAD.

Kementerian Pertanian dalam hal ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan kegiatan IPDMIP pada komponen 4. Komponen 4 ini mengandung 3 sub-komponen yaitu:

- a. peningkatan produktivitas dan layanan pertanian;
- b. peningkatan akses dan layanan pasar; dan
- c. peningkatan layanan dan penggunaan layanan keuangan.

2) READSI

PROGRAM RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING UP INITIATIVE (READSI) (Loan No. 2000001960)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman (Financing Agreement/FA) Nomer 2000001960 antara Pemerintah Indonesia cg. Kementerian Keuangan dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2018, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pelatihan Pertanian telah ditetapkan sebagai Pelaksana Utama (Executing Agency/EA) Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI). Program READSI merupakan pengembangan Program Rural **Empowerment** and (scaling-up) Agricultural Development (READ) yang telah dilaksanakan selama 6 tahun (2008-2014) di 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dan Program Replikasi READ yang telah dilaksanakan selama 3 tahun (2015-2017) di 4 Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Program READ dinilai sebagai program yang berhasil oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan IFAD dalam menurunkan tingkat kemiskinan petani.

Dalam implementasi kegiatan khususnya terkait dengan penyaluran dana ke daerah, Program READSI menggunakan mekanisme keuangan On Granting (Penerusan Hibah). Melalui mekanisme tersebut, sebagian jumlah pinjaman pemerintah pusat akan diterushibahkan ke pemerintah daerah pelaksana program READSI di 6 Provinsi dan 18 Kabupaten.

Pelaksanaan mekanisme keuangan on granting mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.7/2017 yang megatur tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sebagai dasar perencanaan anggaran dan kegiatan di

daerah dengan mekanisme on granting, pada tanggal 12 Desember 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan cq. Direktur Pembiayaan Transfer Non Dana Perimbangan (PTNDP) dan Kepala Daerah Penerima program READSI telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD). Pelaksanaan kegiatan READSI di daerah mensyaratkan pembiayaan pendahuluan (pre financing) - menggunakan dana APBD terlebih dahulu selanjutnya akan dilakukan penggantian dana (reimbursement) oleh pemerintah pusat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan Jangka Panjang (Goal) Tujuan Jangka Panjang Program READSI adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin di wilayah lokasi program READSI (6 Provinsi dan 18 Kabupaten).

Tujuan Jangka Pendek Program READSI adalah memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan, baik secara individu maupun secara kelompok, dengan keterampilan, membangun rasa percaya diri dan pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non-pertanian serta meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Sasaran Penerima Program READSI Sasaran Penerima Program READSI adalah Petani, dengan kriteria termasuk:

- a. Petani miskin yang aktif dan memiliki sumberdaya (lahan, dll) yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan bantuan program;
- b. Petani aktif dan memiliki potensi sebagai "agen perubahan" untuk memotivasi petani lainnya, terutama kelompok miskin, dan memperbaiki penghidupannya;
- c. Petani yang tidak memiliki lahan, petani pemilik lahan sempit, dan kepala keluarga perempuan yang akan dilibatkan secara langsung dalam usaha pengembangan lahan pekarangan, nonfarm, kegiatan perbaikan gizi, dan kegiatan pengelolaan keuangan. Lokasi Program READSI Program READSI akan dilaksanakan di 5 kabupaten eks Program READ di Provinsi Sulawesi Tengah, 4 kabupaten eks Replikasi Program READ di NTT dan Kalimantan Barat serta 9 kabupaten yang belum pernah mendapatkan Program

READ maupun Replikasi Program READ (Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan). Rencana alokasi desa sasaran sebanyak 342 desa dengan rincian sebagai berikut:

No	KAUPATEN	DESA BARU	DESA LAMA
1	Kabupaten Eks READ - 5		
	Kabupaten di Prov Sulawesi		
	Tengah		
	• Buol	10	10
	• Toli-Toli	10	10
	Parigi Moutong	10	10
	• Poso	10	10
	Banggai	10	10
2	Kabupaten Eks Replikasi		
	Program READ		
	Kupang	4	16
	• Belu	13	7
	Sambas	8	12
	Sanggau	5	15
3	Kabupaten Baru:		
	Gorontalo	-	18
	Pohuwato	-	18
	Bone Bolango	-	18
	Kolaka	-	18
	Kolaka Utara	-	18
	Konawe	-	18
	Luwu	-	18
	Luwu Utara	-	18
	Luwu Timur	-	18
	TOTAL	80	262

Komponen Kegiatan

Program READSI mencakup 4 Komponen Utama sebagai berikut:

Komponen 1: Pengembangan Pertanian dan Penghidupan di Pedesaan (Village Agriculture and Livelihoods Development), terdiri dari Sub Komponen:

- 1.1. Pengorganisasian Masyarakat
- 1.2. Pengembangan Pertanian dan Peningkatan Mata Pencaharian di

Pedesaan

- 1.3. Pengembangan Lembaga Keuangan di Pedesaan
- Perbaikan Gizi Keluarga, terutama untuk anakanak pada 1000 hari Pertama Kehidupan

Komponen 2: Peningkatan Pelayanan Penyuluhan, Penyediaan Saprodi, dan Pemasaran (Services, Inputs and Market Linkages), terdiri dari Sub Komponen:

- 2.1. Pelayanan Penyuluhan Pertanian
- 2.2. Pelayanan Sumber Permodalan/Keuangan
- 2.3 Sistem dan Pemasaran Perbenihan
- 2.4. Dukungan dan Pemasaran untuk Petani Kakao (hanya untuk Wilayah Sulawesi)
- 2.5. Pengembangan, Pemasaran dan Pelayanan Kesehatan Ternak (hanya di NTT)

Komponen 3: Tersedianya Dukungan Kebijakan dan Strategi Pembangunan (Policy and Strategy Development Support)

3.1. Penguatan Kebijakan dan Kerangka Pelembagaan untuk Petani dengan Kepemilikan Lahan Sempit.

Komponen 4: Manajemen Pengelolaan Kegiatan (Project Management) di Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Tujuan

Maksud dari penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program READSI Tahun 2019 adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan kegiatan bagi para pelaksana Program READSI di pusat, provinsi, dan kabupaten dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan tahun 2019.

Sasaran

Sasaran Pedoman Pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksana Program READSI di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan pemangku kepentingan lainnya.

3) YESS

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN PEMUDA DI SEKTOR PERTANIAN/YOUTH ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT SUPPORT SERVICES PROGRAMME (YESS PROGRAMME)

> Pendanaan dan Waktu Pelaksanaan

Program YESS dibiayai dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari IFAD (*International Fund for Agriculture Development*). Jumlah Dana proyek ini sebesar USD 57,3 Juta, terdiri dari : Loan/Pinjaman sebesar USD 55,3 Juta dan Grant/ Hibah USD 2 juta. Dana loan dan grant ini dialokasikan di tingkat Pusat sebesar 20% (USD 11,06 juta) dan di daerah 80% (USD 44,24 juta). Alokasi dana Loan pada Program YESS ini dikemukakan pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Alokasi Dana Loan Program YESS berdasarkan Kategori

No	Kategori	Dana (Rp)	Persentase	
1	Cosultancies	72,116,800,000	9.52	%
2	Grant and Subsidies	189,608,000,000	25.03	%
3	Good, Services and Inputs	236,078,400,000	31.16	%
4	Trainings	121,546,400,000	16.04	%
5	Salaries and Allowances	70,034,400,000	9.24	%
6	Operating Cost	68,226,000,000	9.01	%
TOTAL		757,610,000,000	100,00	%

Disamping itu dalam proyek ini juga komponen pendanaan lain yang perlu didukung dan disediakan, yaitu; 1) Financing Facilities for Remitance (FFR) sebanyak USD.105 000, merupakan grant dari IFAD dan langsung dikelola IFAD, 2) pendanaan oleh penerima manfaat (benefecieries) dalam bentuk in-kind sebesar USD 3,128 juta, dan 3) Pendanaan dari Pemerintah Indonesia sebesar USD 12,437 juta

dalam bentuk dana Rupuah Murni Pendamping (RMP) dan recurrent cost dalam bentuk in-kind dan tenaga manajemen.

Proyek dilaksanakan selama 6 tahun (2019 – 2025), kegiatan proyek akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, sementara untuk penyelesaian pertanggung jawaban keuangan (*financial closing date*) berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Lokasi Proyek

Pelaksanaan proyek berlokasi di 4 provinsi dan mencakup 15 kabupaten, yaitu; Provinsi Jawa Barat (kabupaten; Sukabumi, Subang, Cianjur dan Tasikmalaya), Provinsi Jawa Timur (kabupaten; Malang, Pasuruan, Pacitan dan Tulung Agung), provinsi Kalimantan Selatan (kabupaten; Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu), dan provinsi Sulawesi Selatan (kabupaten Bone, Bantaeng, Bulukumba dan Maros). Lokasi proyek ini telah ditetapkan pada saat desain proyek, merupakan hasil diskusi dan penelaahan antara Tim IFAD dan Pemerintah Indonesia.

Komponen dan Kegiatan

Aktifitas Program YESS terbagi menjadi empat komponen kegiatan yang berhubungan dan melengkapi satu sama lain: Komponen 1 dan 2 berfokus kepada peningkatan keterampilan pemuda perdesaan dan lembaga yang melakukan layanan pengembangan bisnis utamanya di bidang pertanian, serta upaya menciptakan kesempatan kerja; Komponen 3 fokus untuk menghubungkan pemuda yang telah memiliki kapasitas berwirausaha kepada institusi keuangan; Komponen 4 bertujuan untuk membangun lingkungan peraturan yang kondusif dimana pekerja pemuda desa dan wirausahawan di bidang pertanian dapat berkembang dengan baik.

Komponen 1 – Transisi Pemuda Pedesaan ke Lapangan Kerja (*Rural Youth Transition to Work*)

Melalui komponen ini, Program YESS akan melakukan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja mahasiswa dari Polbangtan, siswa-siswa muda sekolah pertanian dan pemuda pedesaan yang menganggur, serta memfasilitasi mereka untuk dapat bekerja di sektor pertanian. Kegiatan ini akan dicapai melalui kemitraan yang akan dibangun dengan sekitar 30 lembaga Pelatihan Kejuruan dan Pendidikan Teknis (TVET). TVET yang telah ditetapkan akan difasilitasi untuk dapat meningkatkan kapasitas mereka baik secara lembaga maupun sumberdaya manusia dalam memberikan layanan pendidikan dan pelatihan terhadap mahasiswa/peserta didik yang lebih sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Selain itu, YESS akan mendukung perluasan program pemagangan nasional untuk pekerjaan di bidang pertanian dan agribisnis terpilih, melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Program ini selanjutnya akan mendukung peningkatan pemagangan oleh perusahaan agribisnis dan pertanian modern, untuk memberi manfaat bagi kaum muda yang menganggur dan putus sekolah di kabupaten sasaran.

Sub komponen meliputi: 1) Sinergitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Dunia Usaha, 2) Pelaksanaan magang (*apparentiship*)

Komponen 2 – Pengembangan Kewirausahaan Muda Pedesaan (*Rural Youth Entrepreneurship*)

Cakupan komponen ini adalah mempromosikan kegiatan pertanian kaum muda yang inklusif dan agribisnis dengan memfasilitasi akses para petani muda dan pengusaha kecil di luar pertanian ke layanan dukungan yang responsif dan berkelanjutan, sehingga mereka dapat mengidentifikasi peluang bisnis, mengakses lahan dan teknologi modern, terhubung ke pembeli dan penyedia layanan, dan mengembangkan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan khususnya di bidang pertanian. Kegiatan kewirausahaan muda pengembangan perdesaan ini akan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, melalui jalinan kemitraan dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang berbasis di kabupaten.

Selain itu, Program YESS akan mendukung pengembangan jaringan investasi UKM dan perusahaan teknologi yang siap beri-investasi, yang bersedia tumbuh dan menawarkan pekerjaan kepada pemuda tani, menyediakan pasar, dan layanan baru kepada para petani muda dan pengusaha, sehingga mereka dapat memenuhi syarat untuk investasi dengan dana investasi dan lembaga keuangan lainnya.

Sub komponen meliputi: 1) Peningkatan Kapasitas BDSP (Lembaga Konsultasi dan Pelatihan Agribisnis Berbadan Hukum), 2) Pelayanan bagi Pemuda tani dan Wirausaha Muda.

Komponen 3 – Fasilitasi Akses Permodalan (*Investing for Rural Youth*)

Komponen ini melengkapi Komponen 2 dengan mendukung pendidikan atau pelatihan keuangan kaum muda serta perluasan akses layanan keuangan yang saat ini tersedia untuk kaum muda pedesaan, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga lembaga keuangan formal karena kurangnya pengalaman juga bagi para migran muda beserta keluarganya. Kegiatan pada komponen ini juga akan memfasilitasi perluasan UKM dan perusahaan Fintech / AgriTech yang bersedia memperluas dan menciptakan lapangan kerja baru bagi kaum muda atau bahkan membuka pasar pertanian baru bagi para petani muda, dengan mendukung mereka dalam memperoleh kesiapan investasi dan kemuadian menghubungkan mereka dengan rantai pasat lainnya. Selain itu kegiatan juga akan menyentuh mengenai pengiriman uang migran yang akan ditingkatkan mempromosikan tabungan dan investasi migran ke dalam bisnis pedesaan.

Sub komponen meliputi: 1) Penguatan Kapasitas layanan perbankan (inklusi keuangan), 2) Peningkatan Akses pada Pembiayaan

Komponen 4 – Membangun Lingkungan Usaha yang Kondusif (Enabling Environment for Rural Youth)

Komponen 4 adalah upaya-upaya dalam rangka membangun lingkungan kondusif dan pengembangan lembaga yang mendukung untuk pemuda perdesaan berwirausaha dan bekerja di bidang pertanian dengan cara :

- mempromosikan kemitraan antara para pemangku kepentingan publik, swasta dan masyarakat sipil untuk mendorong keterlibatan kaum muda dalam pertanian di daerah-daerah sasaran;
- (2) membangun model-model bisnis inovatif di provinsi sasaran untuk meningkatkan lingkungan kebijakan dan peraturan di bidang-bidang prioritas utama yang diperlukan untuk mempromosikan keterlibatan pemuda secara inklusif di sektor berbasis pertanian; dan
- (3) memperkuat kapasitas organisasi pemuda untuk berpartisipasi dalam dialog kebijakan.

Sub komponen meliputi: 1) Pengembangan Jalinan Kemitraan Usaha, 2) Mobilisasi Pemuda Pedesaan dalam agribisnis, 3) Pengembangan kebijakan untuk mendukung usaha pemuda di bidang Pertanian, 4) Manajemen Proyek

Kelembagaan

Pengelolaan Progran YESS di tingkat pusat dilakukan oleh National Project Management Unit (NPMU) yang dibentuk dengan Keputusan Kepala BPPSDMP. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian No: 150/ Kpts / KL.230 /l/07/19 tanggal 5 Juli 2019 telah **Program** dibentuk National Project Management Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme = YESS Programme), sebagaimana dikemukakan pada Lampiran1

Pengelola Progran YESS di tingkat Provinsi dilakukan oleh Provincial Project Implemention Unit (PPIU) yang terdapat di Polbangtan (Bogor, Malang dan Gowa) serta SMK-PP Banjarbaru. PPIU terdiri dari Project Manager, bidang program, bidang keuangan, bidang Monitoring dan Evaluasi, serta *District Liason Officer* (DLO) atau penghubung ke setiap kabupaten. Istandi terkit tingkat provinsi antara lain; Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, lembaga Keuangan, KADIN, dll.

Pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten akan dibantu oleh District Implementation Team (DIT) yang dibentuk pada Dinas yang menangani pertanian, terdiri dari Koordinator Pelaksana, Asisten Bidang Program, Asisten Bidang Keuangan, dan Asisten Bidang Monitoring dan Evaluasi. Disamping itu juga dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten (*District Coordination Team = DCT*) yang diketuai oleh BAPPEDA, dengan anggota adalah Dinas terkait dan Pemuda Olahraga, (Pertanian, Koperasi UKM, dan Ketenagakerjaan, KADIN. Lembaga Keuangan, dan organisasi/LSM kepemudaan.

> Outputs dan Outcomes

Setelah 5 tahun pelaksanaan program, diharapkan akan tercapai outputs sebanyak 245000 orang, terdiri dari; 162500 orang pemuda tani dapat mengakses ke BDSP (Lembaga layanan bisnis), 62500 orang pemuda tani dilatih dalam bidang manajemen bisnis, dan 120000 orang pemuda tani dilatih dalam bidang *financial literacy*, disamping 30 lembaga TVET melaksanakan pelatihan bidang kewirausahaan dan ketenagakerjaan. Secara detail target outputs selama lima tahun.

Setelah 5 tahun pelaksanaan program, diharapkan akan tercapai outcomes sebanyak 216900 orang, terdiri dari; 1) Jumlah pemuda dan pemudi mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian sebanyak 32500 orang, 2) Jumlah pemuda tani atau wirausahawann yang dilaporkan meningkat pendapatannya pertanian sebanyak 33800 orang, 3) Jumlah lapangan kerja yang diiciptakan bagi pemuda melalui usaha baru dan UKM yang mendapat keuntungan dari program sebanyak 50600 orang, dan 4) Tambahan jumlah pemuda

dan pemudi mendapatkan akases layanan keuangan sebanyak 100000 orang. Secara daetail target outcomes selama lima tahun

4) SIMURP

Dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan dan memenuhi target Komoditas Strategis Pangan Nasional serta untuk mewujudkan kontribusi irigasi terhadap peningkatan produksi, produktivitas, dan pengentasan kemiskinan, diperlukan pendekatan ganda yang berfokus pada revitalisasi irigasi dan efisiensi melalui modernisasi dan rehabilitasi irigasi. Proyek SIMURP pada Kementerian Pertanian difokuskan pada Climate Smart Agriculture (CSA) untuk menjawab salah satu tantangan dalam peningkatan produksi pangan di tengah perubahan iklim yang berdampak terhadap keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan. Konsep CSA kali oleh Organisasi Pangan diperkenalkan pertama dan Pertanian/Food and Agriculture Organization (FAO) PBB tahun 2010 pada Konferensi Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim di Den Haag. FAO mendefinisikan CSA sebagai "An approach that help to guide actions needed to transform and reorient agricultural systems to effectively support development and ensure food security in a changing climate" (suatu pendekatan yang dapat menuntun dibutuhkan tindakan-tindakan yang untuk mengubah dan mengarahkan kembali sistem pertanian agar secara efektif mendukung pembangunan dan memastikan ketahanan pangan dalam menghadapi iklim yang terus berubah). Tiga hal utama yang menjadi sasaran pencapaian melalui CSA yaitu:

1) Peningkatan produktivitas dan pendapatan sektor pertanian, 2) Mengadaptasi dan membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim, dan 3) Sedapat mungkin mengurangi dan atau meniadakan emisi Gas Rumah Kaca. Jadi, pada dasarnya CSA merupakan pendekatan pada pengembangan strategi pertanian untuk mengamankan ketahanan pangan berkelanjutan dalam menghadapi kondisi perubahan iklim. Sesuai rekomendasi Badan Litbang Pertanian melalui Balai Penelitian Lingkungan Pertanian penerapan CSA khususnya pada komoditi padi dan komoditas lainnya yang bernilai ekonomi tinggi dilakukan melalui paket teknologi yang meliputi

penentuan waktu tanam dengan penggunaan kalender tanam, penggunaan bahan organik untuk membuat auguk organik. penggunaan perangkat uji tanah sawah untuk menentukan dosis pupuk dasar (pupuk P, N, dan K), penggunaan bibit unggul, rendah emisi dan bermutu (melakukan uji benih), penggunaan bibit usia muda tanam jajar legowo dengan 2-3 bibit/lubang pada kondisi macakmacak, penerapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terpadu untuk preventif, kegiatan pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK), teknologi irigasi intermittent dan Alternate Wet and Drying (AWD). Agar pelaksanaan Proyek SIMURP berjalan efektif dan efisien perlu disusun Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan bagi para pelaksana proyek di pusat dan daerah.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian harus diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di Pusat maupun di Daerah. Keberagaman hasil penyelenggaraan kegiatan tersebut, wajib dilaporkan bentuk kepada para pemangku kepentingan sebagai Berkaitan pertanggungjawaban kineria instansi. dengan pertanggungjawaban kinerja tahun 2019, maka disusun Laporan Tahunan Badan PPSDMP.

B. Tujuan

Penyusunan **Laporan Tahunan** bertujuan untuk memberikan informasi penyelenggaraan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang diwujudkan melalui serangkaian kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian selama tahun 2019.

C. Output

Output laporan tahunan berupa dokumen yang berisi informasi mengenai penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSDMP selama tahun 2019, meliputi: rencana dan realisasi program, kegiatan, anggaran, permasalahan dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun mendatang.

BAB II ORGANISASI

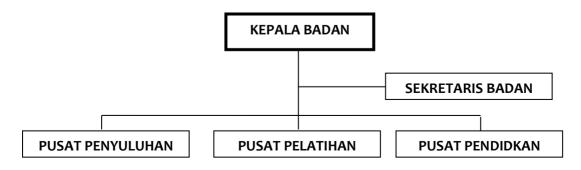
A. Dasar Hukum dan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian Pertanian, tugas Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan PPSDMP mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- . Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- 2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- 3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelengaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
- 5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
- 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
- 7. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
- 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN



Pelaksanaan tugas fungsi Badan PPSDMP di pusat, didukung oleh 4 unit kerja Eselon II, yaitu:

- 1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
- 2. Pusat Pelatihan Pertanian;
- 3. Pusat Pendidikan Pertanian;
- 4. Sekretariat Badan PPSDMP.
- 1) Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian:
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

Struktur organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan terdiri atas: (a) Subbidang Program dan Kerjasama Penyuluhan; dan (b) Subbidang Evaluasi Penyuluhan;
- b. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri atas (a) Subbidang Informasi dan Materi Penyuluhan; dan (b) Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani;
- c. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri atas (a) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; dan (b) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian:
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- e. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian;
- f. Penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertaian.

Struktur organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas dari 3 bidang dan 6 subbidang, yaitu:

- a. Bidang Program dan Kerjasama Pelatihan terdiri atas (a) Subbidang Program Pelatihan; dan (b) Subbidang Kerjasama Pelatihan;
- b. Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan
 Pertanian terdiri atas (a) Subbidang Penyelenggaraan Pelatihan dan
 (b) Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan;
- Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi terdiri atas (a) Subbidang Standardisasi Kompetensi dan (b) Subbidang Sertifikasi Profesi.
- 3) Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelengaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
 - b. Pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
 - Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; dan

f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

Pusat Pendidikan Pertanian terdiri atas 3 bidang dan 6 subbidang, yaitu:

- a. Bidang Program dan Kerjasama Pendidikan terdiri atas (a)
 Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan (b) Subbidang
 Kerjasama dan Tugas Belajar;
- Bidang Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas (a) Subbidang Kurikulum dan Sistem Pembelajaran dan (b) Subbidang Peserta Didik; dan
- Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan terdiri atas (a) Subbidang Kelembagaan Pendidikan dan (b) Subbidang Ketenagaan Pendidikan.
- 4) Sekretariat Badan PPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan PPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi:
 - Koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan PPSDMP.

Struktur organisasi Sekretariat Badan PPSDMP terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan terdiri atas: (a) Subbagian Program, (b)
 Subbagian Anggaran, dan (c) Subbagian Kerjasama;
- Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: (a) Subbagian Perbendaharaan, (b) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; serta (c) Subbagian Perlengkapan;
- Bagian Umum terdiri atas: (a) Subbagian Hukum dan Organisasi, (b)
 Subbagian Kepegawaian, dan (c) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: (a) Subbagian Data dan Evaluasi, (b) Subbagian Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan, dan (c) Subbagian Hubungan Masyarakat.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain didukung oleh 4 unit organisasi Eselon II di Pusat, Badan PPSDMP juga memiliki 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) (20 Satuan Kerja/Satker) yang berlokasi di daerah. Badan PPSDMP terdiri dari 9 UPT Pendidikan Pertanian (6 UPT setingkat Eselon II, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian, dan 3 UPT setingkat Eselon IV, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri/SMK-PPN). Selain itu Badan PPSDMP memiliki 10 unit UPT Pelatihan Pertanian (8 UPT setingkat Eselon II terdiri dari 1 Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian/PPMKP. Pelatihan 7 Balai Besar Pertanian/Peternakan/ Kesehatan Hewan atau BBPP/BBPKH, dan 2 UPT setingkat Eselon III, yaitu Balai Pelatihan Pertanian/BPP).

Secara lengkap, masing-masing UPT BPPSDMP adalah sebagai berikut:

UPT Pendidikan Pertanian terdiri dari:

- 1. Polbangtan Medan Sumatera Utara (1 Satker);
- 2. Polbangtan Bogor Jawa Barat (1 Satker);
- Polbangtan Magelang Jawa Tengah (2 Satker);
- Polbangtan Malang Jawa Timur (1 Satker);
- 5. Polbangtan Gowa Sulawesi Selatan (1 Satker);
- 6. Polbangtan Manokwari Papua Barat (1 Satker);
- 7. SMK-PPN Sembawa Palembang Sumatera Selatan (1 Satker);
- 8. SMK-PPN Banjarbaru Kalimantan Selatan (1 Satker);
- SMK-PPN Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker).

UPT Pelatihan Pertanian terdiri dari:

- 1. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor Jawa Barat (1 Satker);
- Balai Besar Pelathan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara-Bogor Jawa Barat (1 Satker);
- 3. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat (1 Satker);
- 4. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan-Malang Jawa Timur (1 Satker);

- 5. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur (1 Satker);
- 6. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker);
- 7. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan (1 Satker);
- 8. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan (1 Satker):
- 9. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi (1 Satker);
- 10. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung (1 Satker).

Dasar hukum eksistensi kelembagaan UPT lingkup Badan PPSDMP masingmasing adalah sebagai berikut:

- 1. Keputusan Presiden Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 550/Kpts/ OT.210/9/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 367/Kpts/OT.210/6/200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 554/ Kpts/OT.210/9/2002. Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian tentang Nomor: 368/Kpts/OT.210/6/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/OT.020/5/ 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembengunan Pertanian;
- Keputusan Presiden Nomor: 58/2002 tentang Pendirian STPP Medan, STPP Magelang, STPP Gowa dan STPP Manokwari, yang ditindaklanjuti dengan:
 - a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Magelang;
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 44/Permentan/OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Goa;
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 45/Permentan/OT.140/10 /2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Bogor;
 - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 46/Permentan/OT.140/10/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Manokwari;
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 47/Permentan/OT.140/10/ 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Malang;

- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/OT.140/10/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Medan;
- 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 100/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian.
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 101/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 102/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 103/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 104/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 105/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 106/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku.
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 107/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara.
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 108/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 109/Permentan/OT.140/ 10/2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung.
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 110/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri.

Selain di pusat dan UPT, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan sumber anggaran dari DIPA Badan PPSDMP. Satuan Kerja tersebut adalah Satker Dekonsentrasi di tingkat provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di tingkat kabupaten/kota, seperti Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten/Kota, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Kabupaten/Kota.

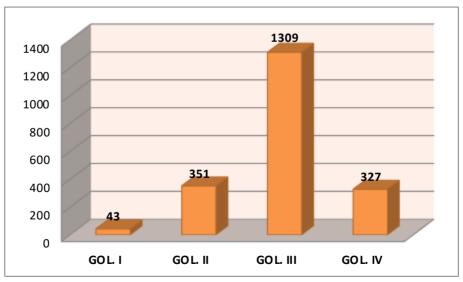
B. Keragaan Sumber daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan PPSDMP didukung oleh 2.064 orang aparat, yang terdiri atas aparat yang bertugas di pusat sebanyak 299 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 1.835 orang.

Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan:

1. Golongan;

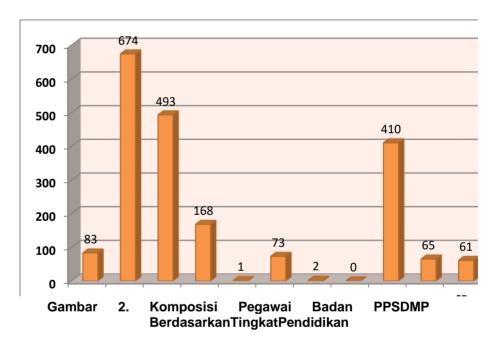
Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan sebanyak 2030 orang, terdiri atas: golongan I sebanyak 43 orang; golongan II sebanyak 351 orang; golongan III sebanyak 1.309 orang, dan golongan IV sebanyak 327 orang. Komposisi pegawai berdasarkan golongan ditampilkan pada Gambar 1



Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan

2. Tingkat pendidikan

Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: 83 orang berpendidikan S3 (doktor), 674 orang berpendidikan S2 (magister), 661 orang berpendidikan S1/D4 (sarjana/setingkat sarjana), 76 orang berpendidikan D1-D3 (diploma), 410 orang berpendidikan SLTA, 65 orang berpendidikan SLTP dan 61 orang berpendidikan SD. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Gambar 2.



BAB III RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Program

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan PPSDMP tahun 2019 adalah Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dengan fokus pada peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Oleh karena itu, Badan PPSDMP memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi pendidikan. Dengan fungsi ganda tersebut, tahun 2019 Badan PPSDMP mengembang 4 program, yaitu:

- 1. Program Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
- 2. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian;
- 3. Program Pendidikan Tinggi Pertanian dan Pendidikan Menengah Pertanian (SMKPP)
- 4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian.

B. Rencana Anggaran dan Kinerja

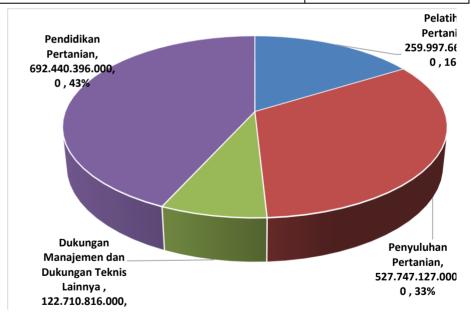
1. Rencana Anggaran

Anggaran tahun 2019 dialokasikan dalam rangka mendukung kinerja 4 unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, serta Sekretariat Badan PPSDMP. Selain itu anggaran ditujukan untuk 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 34 Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 8 Satker Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan).

Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2019 sebesar **Rp.1.602.896.004.000,-**. Adapun komposisi anggaran berdasarkan Kinerja utama ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2019

NO	KINERJA	PAGU (Rp)
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	259.997.665.000
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	527.747.127.000
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	122.710.816.000
4	Pendidikan Pertanian	692.440.396.000
	TOTAL	1.602.896.004.000



Gambar 3. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Utama Tahun 2019

Secara rinci rencana anggaran Badan PPSDMP tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2. dibawah:

Tabel 2.
Rencana Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2019

Program		Kinerja		Output	Pagu Anggaran
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1)	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian	71.486.343.000
			2)	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	7.145.580.000
			3)	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	4.754.850.000
			4)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan Pertanian	3.709.000.000
			5)	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	20.905.492.000
			6)	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	35.891.611.000
			7)	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	25.870.166.000
			8)	Layanan Perkantoran	90.234.623.000
	2.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1)	Peningkatan Kinerja Penyuluh	440.527.033.000
			2)	Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian	8.370.000.000
			3)	Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani	2.500.000.000
			4)	Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.750.000.000
			5)	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian	3.400.000.000
			6)	Fasilitas Teknis Dukungan	33.131.578.000

Program	Kinerja	Output	Pagu Anggaran
		Penyuluhan Pertanian	
		Gerakan Pemberdayaan Petani Mendukung UPSUS	23.250.000.000
		8) Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	8.818.516.000
		Petani	
	3. Pendidikan	1) Mahasiawa yang	
	Pertanian	Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian	130.119.750.000
		Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	20.958.750.000
		Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Pendidikan Vokasi Pertanian	8.637.891.000
		4) Mahasiswa/ Alumni dari Perguruan Tinggi yang Melakukan Pendampingan Dalam Kinerja Peningkatan Produksi Komoditas Strategis	92.706.095.000
		Pertanian	
		5) Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	34.607.145.000
		Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	30.355.252.000
		Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Kawasan Pertanian	1.345.500.000

Program	Kinerja	Output	Pagu Anggaran
		Penajaman Kompetensi SDM Pertanian	6.192.235.000
		Kelembagaan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan	1.245.520.000
		5) Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	216.899.335.000
		6) Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan	39.490.680.000
		7) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor Pertanian (YESS)	3.419.867.000
		untuk Peningkatan Kapasitas Petani	
		8) Layanan Sarana dan Prasarana Internal 9) Layanan Perkantoran	904.640.000
	4. Dukungan Manajemen dan Dukungan	9) Layanan Perkantoran	103.337.730.000
	Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembanga	Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	41.769.450.000
	n Sdm Pertanian		
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	49.697.791.000
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3257512000
		4) Layanan Perkantoran	27986063000
	TOTAL	-	1.602.896.004.000

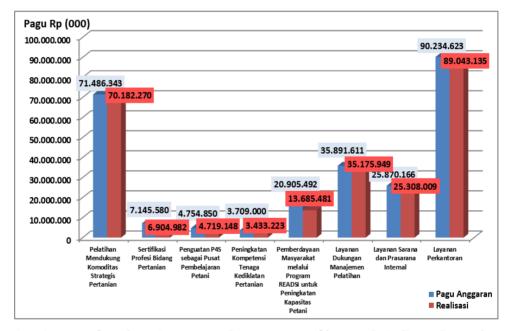
1) Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2019

Capaian anggaran pada Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2019 mencapai **Rp.248.452.200.239,- (95,56%)** dari pagu sebesar **Rp.259.997.665.000**,-. Capaian tertinggi terdapat pada Kinerja Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani sebesar 99,25%, sedangkan Capaian terendah terdapat pada Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani sebesar 65,46%, Capaian tidak terserap dikarenakan (1) Firm Pemberdayaan proses lelang konsultan pemberdayaan (firm) mengalami gagal lelang pada bulan April dan dilakukan leleng ulang, (2) Proses leleng membutuhkan 6 x NOL IFAD (persetujuan) setiap tahapan proses yang dihasilkan oleh UKP membutuhkan waktu lebih lama dari pada pengadaan pada umumnya, (3) kontrak firm yang sedianya ditargetkan bekerja 8 bulan menjadi 3 bulan, (4) Fasilitator Desa (FD) Kontrak FD yang sedianya ditargetkan bekerja 8 bulan menjadi 3 bulan karena menunggu proses lelang selesai dan kontrak dengan Firm Pemberdayaan, (5) Kinerja kerjasama pelatihan dengan MARS Academy sebanyak 204 orang sampai data Capaian (19 Desember) belum selesai dilaksanakan, (6) Sisa anggaran karena adanya selisih trasfort, (7) Perjalanan dinas untuk monev dan pendampingan penguatan kerjasama tidak mencapai target, dan (8) pakat jasa konsultan individual tidak terserap seluruhnya. Secara rinci realiasi Anggaran Pusat Pelatiahan Pertanian pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel.3 berikut:

Tabel. 3
Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
Tahun 2019

No	Output	Pagu Anggaran	Capaian	%
1	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian	71.486.343.000	70.182.270.914	98,18
2	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	7.145.580.000	6.904.982.367	96,63
3	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	4.754.850.000	4.719.148.220	99,25

No	Output	Pagu Anggaran	Capaian	%
4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan Pertanian	3.709.000.000	3.433.223.100	92,56
5	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	20.905.492.000	13.685.481.065	65,46
6	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	35.891.611.000	35.175.949.192	98,01
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	25.870.166.000	25.308.009.426	97,83
8	Layanan Perkantoran	90.234.623.000	89.043.135.955	98,68
	TOTAL	259.997.665.000	248.452.200.239	95,56



Gambar 4. Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2019

2) Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Capaian anggaran pada Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 2019 mencapai **Rp. 501.869.475.902,- (95,10%)** dari pagu sebesar **Rp. 527.747.127.000**,-. Capaian tertinggi terdapat pada Kinerja Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluhan Pertanian sebesar 99,49%, sedangkan Capaian terendah terdapat pada Kinerja Program

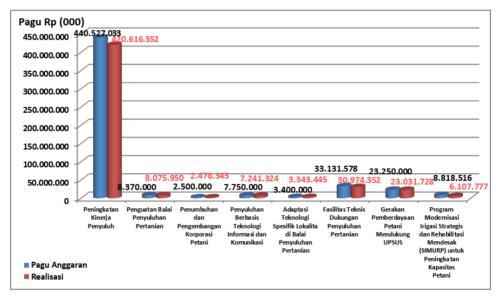
Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani sebesar 69.26%, Capaian tidak terserap dikarenakan Kinerja tersebut:

- a) Pelaksanaan Kinerja-Kinerja SIMURP yang semula dijadwalkan selama 6 bulan baru mulai efektif berjalan selama 4 bulan yaitu dari bulan September hingga Desember 2019. Dengan keterbatasan waktu tersebut serta mengingat pelaksanaannya pada akhir tahun, banyak Kinerja SIMURP yang jadwalnya bersamaan dengan Kinerja dari APBD dan APBN sehingga pelaksana di daerah harus menentukan skala prioritas.
- b) Kinerja yang belum dilaksanakan, yaitu pengadaan konsultan spesialis Kinerja SIMURP. Kinerja ini terkendala dalam proses pengadaan (lelang) yaitu beberapa calon konsultan monev yang sudah mengikuti proses lelang/pengadaan belum memenuhi kualifikasi/persyaratan sesuai dengan yang dtetapkan serta tidak ada pembanding. Sedangkan untuk pengadaan konsultan spesialis CSA, IT dan keuangan, sampai batas waktu yang ditentukan belum ada perusahaan/individual yang memasukkan penawaran.
- c) Beberapa penyerapan rendah hal ini terjadi karena satker baru melaksanakan Kinerja di bulan November dan terdapat Kinerja dari beberapa sumber anggaran (APBN dan APBD) yang belum dilaksanakan sehingga harus dilaksanakan secara bersamasama, dampaknya penyerapan Kinerja pada proyek SIMURP belum maksimal.. Secara rinci realiasi Anggaran Pusat Pelatiahan Pertanian pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel.4 berikut:

Tabel. 4
Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
Tahun 2019

No	Output	Pagu Anggaran	Capaian	%
1	Peningkatan Kinerja Penyuluh	440.527.033.000	420.616.552.780	95,48
2	Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian	8.370.000.000	8.075.950.000	96,49
3	Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani	2.500.000.000	2.478.345.000	99,13

No	Output	Pagu Anggaran	Capaian	%
4	Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.750.000.000	7.241.324.500	93,44
5	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian	3.400.000.000	3.343.445.310	98,34
6	Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluhan Pertanian	33.131.578.000	30.974.352.152	99,49
7	Gerakan Pemberdayaan Petani Mendukung UPSUS	23.250.000.000	23.031.728.780	99,06
8	Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	8.818.516.000	6.107.777.380	69.26
	TOTAL	527.747.127.000	501.869.475.902	95,10



Gambar 5. Capaian Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2019

3) Capaian Anggaran Pendidikan Pertanian (Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian dan Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP)

Capaian anggaran pada Pendidikan Pertanian tahun 2019 mencapai Rp. 636.870.342.556,- (91,97%) dari pagu sebesar

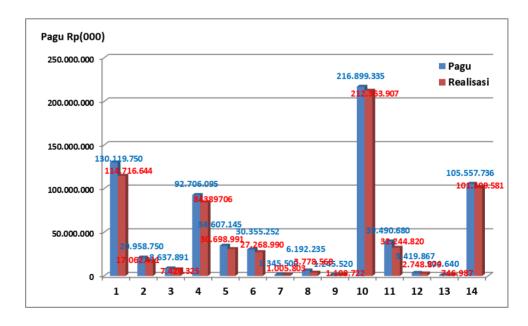
Rp. 692.440.396.000,-. Capaian tertinggi terdapat pada Layanan Perkantoran sebesar 95,98%, sedangkan Capaian terendah terdapat pada Kinerja Penajaman Kompetensi SDM Pertanian sebesar 61,02%, dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Kawasan Pertanian (74,75%) Capaian anggaran tidak terserap dikarenakan (1) perencanaan anggaran lebih besar dari pelaksanaan, (2) narasumber yang diharapkan banyak tidak dapat memenuhi undangan, (3) adanya revisi anggaran terkait Kurang tertibnya administrasi keuangan; (4) Jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur dari jadwal yang telah ditetapkan, dan (5) keterbatasan waktu dan personel yang melaksanakan pendampingan. Secara rinci realiasi Anggaran Pusat Pendidikan Pertanian pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel.5 berikut:

Tabel 5.

Capaian Anggaran Pendidikan Pertanian (Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian dan Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP)

No	Output	Pagu Anggaran	Capaian	%
1	Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian	130.119.750.000	114.716.644.799	88,16
2	Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	20.958.750.000	17.062.411.670	81,41
3	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Pendidikan Vokasi Pertanian	8.637.891.000	7.426.325.951	85,97
4	Mahasiswa/ Alumni dari Perguruan Tinggi yang Melakukan Pendampingan Dalam Kinerja Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian	92.706.095.000	84389706648	91,03
5	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	34.607.145.000	30.698.991.745	88,71
6	Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	30.355.252.000	27.268.990.267	89,83
7	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Kawasan Pertanian	1.345.500.000	1.005.803.542	74,75

No	Output	Pagu Anggaran	Capaian	%
8	Penajaman Kompetensi SDM Pertanian	6.192.235.000	3.778.568.907	61,02
9	Kelembagaan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan	1.245.520.000	1.108.722.499	89,02
10	Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	216.899.335.000	212.363.907.830	97,91
11	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan	39.490.680.000	32.244.820.556	81,65
12	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	3.419.867.000	2.748.879.592	80,38
13	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	904.640.000	746.987.550	82,57
14	Layanan Perkantoran	105.557.736.000	101.309.581.000	95,98
	TOTAL	692.440.396.000	636.870.342.556	91,97



Gambar 6. Capaian Anggaran Pendidikan Pertanian (Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian dan Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP)

4) Capaian Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Capaian anggaran pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2019 mencapai **Rp. 96.144.366.294,- (78,35%)** dari pagu sebesar **Rp. 122.710.816.000,-**. Capaian tertinggi terdapat pada Layanan Perkantoran sebesar 97,62%, sedangkan Capaian terendah terdapat pada Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani sebesar 41,95%, Capaian program tersebut yang tidak terserap dikarenakan:

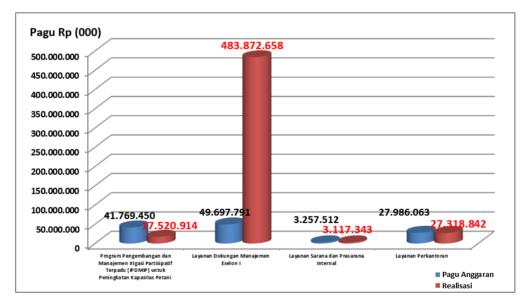
- Pengadaan yang sering gagal lelang atau peminat yang sedikit sehingga harus dilakukan lelang ulang sedangkan waktu terus berjalan
- Kurangnya komitmen pimpinan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk Kinerja IPDMIP
- Pergantian pelaksana Kinerja di daerah yang sering terjadi dalam satu tahun sehingga perlu pemahaman kembali terhadap pedoman pelaksanaan
- Kinerja Sekolah Lapang belum semua lokasi dapat melaksanakan karena dilanda musim kekeringan sehingga tidak ada air, dan saluran irigasi yang belum direhab.
- Provinsi yang belum melakukan pengadaan benih dikarenakan harus melakukan revisi di DPA Perubahan.

Secara rinci realiasi Anggaran Pusat Pelatiahan Pertanian pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel.6 berikut

Tabel. 6

Capaian Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2019

No	Output	Pagu Anggaran	Capaian	%
1	Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	41.769.450.000	17.520.914.353	41,95
2	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	49.697.791.000	48.387.265.865	96,96
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.257.512.000	3.117.343.716	95,70
4	Layanan Perkantoran	27.986.063.000	27.318.842.360	97,62
	TOTAL	122.710.816.000	96.144.366.294	78,35



Gambar 7. Capaian Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2019

2. Rencana Kinerja

Kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan PPSDMP Pusat, yaitu (a) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (b) Pendidikan Pertanian; (c) Pendidikan Menengah Pertanian; (d) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; (e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP mempunyai target sasaran pada tahun 2019. Rencana Kinerja dan target sasaran Kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7.

Rencana Kinerja dan Target Sasaran Badan PPSDMP Tahun 2019

Program		Kinerja		Output	Target Volume Keluaran
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1)	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian (orang)	29.875
			2)	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (orang)	2.680
			3)	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani (unit)	234
			,	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan Pertanian (orang)	196
			5)	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani (tahun)	1
			6)	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan (layanan)	68
			7)	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)	11
			8)	Layanan Perkantoran (layanan)	65
	2.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1)	Peningkatan Kinerja Penyuluh (orang)	44.897
			2)	Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (unit)	1.550

Program	Kinerja	Output	Target Volume Keluaran
		Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani	50
		Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPP)	5.517
		5) Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian (unit)	68
		Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluhan Pertanian (layanan)	6
		Gerakan Pemberdayaan Petani Mendukung UPSUS (POKTAN)	23.250
		Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani (petani)	6.000
	3. Pendidikan Pertanian	Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian (orang)	4.713
		Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	300
		Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Pendidikan Vokasi Pertanian (orang)	327
		Mahasiswa/ Alumni dari Perguruan Tinggi yang Melakukan Pendampingan Dalam Kinerja Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian (orang)	1.631
		5) Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani (kelompok)	997
		6) Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (siswa)	22.733
		7) Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Kawasan Pertanian (provinsi)	3
		Penajaman Kompetensi SDM Pertanian (orang)	2.125
		9) Kelembagaan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (satker)	11

Program	Kinerja	Output	Target Volume Keluaran
		10) Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (satker)	12
		11) Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan (layanan)	6
		12) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani (pemuda tani)	220.000
		13) Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)	10
		14) Layanan Perkantoran (layanan)	21
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembang an Sdm Pertanian		Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani (lokasi)	90
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (layanan)	1
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)	1
		4) Layanan Perkantoran (layanan)	1

1) Capaian Kinerja Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Capaian Kinerja merupakan capaian fisik dari masing-masing Kinerja kinerja Kinerja/output utama Badan PPSDMP selama tahun 2019 dengan cara membandingkan antara Capaian dengan rencana atau target.

- a. Pelatihan Mendukung Komoditas Strategi Pertanian, terdiri dari pelatihan bagi aparatur dan non aparatur.
 - a) Pelatihan bagi aparatur pertanian melalui peltihan:

- (1) Peltihan dalam Jabatan (Peltihan Kepemimpinan, Peltihan Prajabatan, Peltihan Administrasi dan Manajemen, Peltihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian);
- (2) Peltihan Teknis Pertanian mendukung komonditas prioritas (Teknis Tanaman Pangan; Teknis Perkebunan; Teknis Hortikutura; Teknis Mendukung Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian).
- b) Pelatihani bagi non aparatur pertanian meliputi pelatihan:
 - (1) Peltihan Kewirausahaan;
 - (2) Peltihan Teknis Pertanian mendukung komonditas prioritas;
 - (3) Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan (Agri Training Camp).



Bimbingan Teknis Metodologi Pelatihan Pertanian

Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani
 Fasilitasi kelembagaan pelatihan petani (P4S) didukung oleh
 Kinerja:

- (a) Penghargaan P4S Berprestasi;
- (b) Penguatan Kelembagaan;
- (c) Pemberdayaan SDM melalui Peltihan bagi Petani di P4S.



P4S Penerima Penghargaan Teladan dan Berprestasi



Kementan Memberikan Penghargaan Nasional 2019 Kepada Pelaku Utama Pembangunan Pertanian Berprestasi

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk meningkatkan Kapasitas Petani

Program READ-SI bertujuan untuk memperbaiki mata pencarian kaum miskin perdesaan secara berkelanjutan, adapun tujuan yang hendak di capai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam di 30 (tiga puluh) desa sasaran di provinsi Kalimatan Barat dan provinsi NTT..



Fasilitator Desa Program READSI mengikuti Kinerja Peningkatan Kapasitas Program READSI (Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling Up Initiative) yang berlangsung selama 3 hari mulai 18 s.d 20 Desember 2019 di Hotel Best Western Palu Sulawesi Tengah



Pertemuan koordinasi ini Program READSI 2019, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Kinerja di pusat dan daerah khususnya terkait dengan konsolidasi dan sinergi program



Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Arah Kebijakan Pelatihan Tahun 2020 Serta Inovasi Pelayanan Publik

- Layanan Internal/ Overhead

Layanan Internal (Overhead) merupakan Fasilitasi prasarana dan sarana pembelajaran kelembagaan pelatihan ditujukan pada UPT Pelatihan Pertanian Pusat, yang ditujukan untuk pengembangan laboratorium, Pusat Inkubator Agribinis (PIA), dan rehabiliitasi gudang.

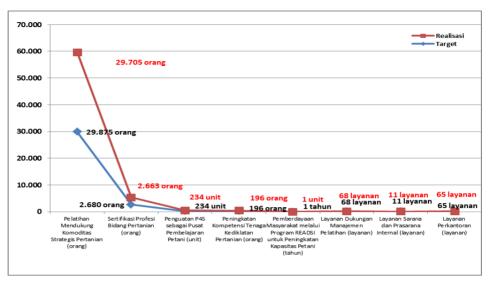
- Layanan Perkantoran

Layanan Pendidikan dan Pelatihan merupakan Fasilitasi Kinerja operasional pada Kinerja Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (PSPP), yang ditujukan untuk mendukung dan memperlancar operasional

Capaian Kinerja Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2019 pada umumnya tercapai rata-rata mencapai 100%. Secara rinci realiasi kinerja Pusat Pendidikan Pertanian pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel.8 berikut:

Tabel. 8
Raelisasi Kinerja Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

No	Output	Target	Capaian	%
1	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian (orang)	29.875	29.705	99,43
2	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (orang)	2.680	2.663	99,37
3	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani (unit)	234	234	100,00
4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan Pertanian (orang)	196	196	100,00
5	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani (tahun)	1	1	100,00
6	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan (layanan)	68	68	100,00
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)	11	11	100,00
8	Layanan Perkantoran (layanan)	65	65	100,00



Gambar 8. Capaian Kinerja Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

2) Capaian Kinerja Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Capaian Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian didukung oleh Kinerja-Kinerja yang antara lain:

- Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian (penumbuhan dan pengembangan KEP, sekolah lapang mendukung UPSUS di tingkat Kecamatan).



Pertemuan Penguatan KEP dalam rangka mendukung KOSTRATANI



Penguatan Kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Melalui Kinerja Dekonsentrasi Banper 2019

- Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluhan Pertanian

Capaian fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani didukung oleh Kinerja: (a) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani; serta (b) Pemberdayaan Petani di Sentra Produksi Pangan dan Fasilitasi bagi penyuluh pertanian didukung dengan Kinerja: (a) Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS; (b) Honorarium dan Biaya Operasional THL-TB Penyuluh Pertanian selama 11 bulan; dan (c) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya.



Susun Programa Penyuluhan 2020, Hasilkan Penyuluh Luar Biasa Dukung Kostratani

 Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani

Kinerja CSA bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, mengajarkan budidaya pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, mengurangi risiko gagal panen, mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan pendapatan petani di khususnya di Daerah Irigasi Proyek SIMURP.

Lokasi pelaksanaan proyek SIMURP berada 13 Daerah Irigasi (DI) dan dua Daerah Rawa (DR) di delapan Provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat) dan 16 Kabupaten (Serdang Bedagai, Deli Serdang, Banyuasin, Indramayu, Cirebon, Karawang, Subang, Purworejo, Purbalingga, Banjarnegara, Jember, Katingan, Bone, Takalar, Pangkajene Kepulauan, dan Lombok Tengah.

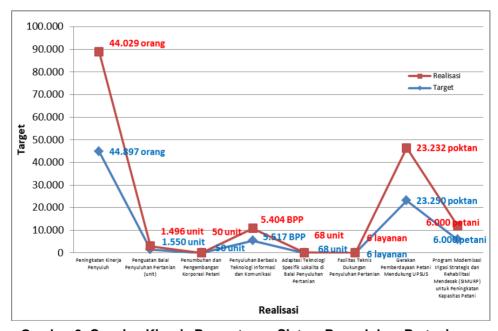


Kementan Launching SIMURP, Optimalisasi Sistem Irigasi

Capaian Kinerja Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tahun 2019 pada umumnya tercapai rata-rata mencapai 99,06%. Secara rinci realiasi kinerja Pusat Pendidikan Pertanian pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel.9 berikut:

Tabel. 9
Capaian Kinerja Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

No	Output	Target	Capaian	%
1	Peningkatan Kinerja Penyuluh (orang)	44.897	44.029	98,07
2	Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (unit)	1.550	1.496	96,52
3	Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani (unit)	50	50	100,00
4	Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPP)	5.517	5.404	97,95
5	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian (unit)	68	68	100,00
6	Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluhan Pertanian (layanan)	6	6	100,00
7	Gerakan Pemberdayaan Petani Mendukung UPSUS (POKTAN)	23.250	23.232	99,92
8	Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani (petani)	6.000	6.000	100,00



Gambar 9. Capaian Kinerja Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

3) Capaian Kinerja Capaian Anggaran Pendidikan Pertanian (Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian)

Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian didukung oleh Kinerja, anatara laian:

- Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar.

Kinerja yang dilakukan untuk mendukung Kinerja Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 Bagi Aparatur Pertanian Melalui Tugas Belajar, meliputi : a) Penyusunan RIPTB; (b) Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar; (c) Penetapan Peserta Tugas Belajar; (d) Bantuan Beasiswa Program Tugas Belajar S2; (e) Bantuan Beasiswa Program Tugas Belajar S3; (f) Koordinasi dan Evaluasi Tugas Belajar dengan 10 Perguruan Tinggi; (g) Pembekalan, Pengawalan dan Pendampingan Tugas Belajar Dalam Negeri.

Kinerja pengembangan kapasitas aparatur pertanian melalui program tugas belajar S2 dan S3 dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pendidik Pertanian bekerjasama dengan sembilan perguruan tinggi negeri mitra. Perguruan tinggi tersebut adalah : Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Hasanuddin dan Universitas Padjajaran. Pada tahun 2019 jumlah peserta tugas belajar adalah 313 orang yang tersebar di 10 perguruan tinggi mitra



Penandatangan Perpanjangan Naskah perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (PTN) mitra dan Evaluasi Kinerja Tugas Belajar



Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tugas Belajar Program Magister dan

- Mahasiswa/ Alumni dari Perguruan Tinggi yang Melakukan Pendampingan Dalam Kinerja Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian. Guna mencapai arah pembangunan pertanian yaitu menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan strategis berupa (1) Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; (2) Meningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Mewujudkan Kesejahteraan Petani; dan (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Pendidikan Pertanian, sebagai salah satu Pusat pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, menerjemahkan kebijakan strategis Kementerian Pertanian melalui Program Pendampingan Mahasiswa/Alumni terkait Kebijakan Strategis Kementerian Pertanian. Kebijakan Stretagis tersebut adalah:

- 1. Pendampingan dan pengawalan kebijakan strategis:
 - a. Penambahan Luas Tambah Tanam dan optimalisasi pemanfaatan alat mesin pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas pangan strategis
 - b. Peningkatan produktivitas daging sapi melalui program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting)
- Pendampingan Mahasiswa dan Dosen di daerah Perbatasan melalui pengabdian masyarakat dan Praktek Kerja Lapang Mahasiswa.
- Pendampingan dan pengawalan Dosen dan Mahasiswa dalam Program Peningkatan Kompetensi Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) di Bidang Pertanian.

Pendampingan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Dukungan Pusdik Terhadap Kebijakan Strategis BPPSDMP

Dalam rangka meningkatkan swasembada pangan, perlu dilaksanakan pendampingan mahasiswa/alumni Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan Perguruan Tinggi Mitra (PTM). Adapun Politeknik Pembangunan Pertanian dan

Perguruan Mitra Pendampingan Tinggi Peserta Mahasiswa/Alumni Dan Dalam Rangka Peningkatan Swasembada Pangan Tahun 2019 sebagai berikut : Politeknik Medan; Politeknik Pembangunan Pembangunan Pertanian Pertanian Bogor; Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang; Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang; Pembangunan Pertanian Malang: Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa; Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari; Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala; Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara: Fakultas Pertanian Universitas Udayana; Fakultas Pertanian Universitas Mataram Dan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

Meningkatnya minat generasi muda pada sektor pertanian memberikan peluang untuk mendorong percepatan pembangunan pertanian. Guna mendukung program pencapaian swasembada pangan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian memberikan bantuan ayam. Salah satu sasaran yang potensial untuk ditumbuhkan minatnya adalah santri yang berada di pondok pesantren.

Peningkatan minat santri di bidang pertanian dapat dilakukan melalui Kinerja Peningkatan Kompetensi Santri Tani Milenial bidang pertanian. Santri tani diharapkan tergabung dalam Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) sebagai media organisasi pembelajaran di bidang pertanian dan dapat mengimplementasikan hasil bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti dalam bentuk beternak ayam di pondok pesantren.

Pada tahun anggaran 2019 bantuan ayam diberikan kepada 387 KSTM yang tersebar di 12 kabupaten, yaitu : Kota Bekasi; Kabupaten bekasi; Kota Tasikmalaya; Kabupaten Tasikmalaya; Kota Cianjur; Kabupaten Cianjur' Ciamis, Banjar; Pangandaran; Majalengka; kuningan dan Garut.

- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam Rangka Regenerasi Petani.

Untuk mendukung Kinerja Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dilakukan Kinerja sebagai berikut : (a) Pertemuan Koordinasi – Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran dan Penumbuhan: (b) Workshop Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran dan Penumbuhan; (c) Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran Penumbuhan: (d) Evaluasi Wirausahawan Muda Pertanian -Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran dan Penumbuhan; (e) Pertemuan Koordinasi- Penumbuhan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (f) Wirausahawan Wirausahawan Penumbuhan Workshop Muda Pertanian-Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan: (g) Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (h) Temu Inovasi Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (i) Evaluasi Wirausahawan Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (j) Pertemuan Koordinasi Wirausahawan Muda Pertanian - Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Kemandirian: (k) Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian -Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Kemandirian; (I) Penganugerahaan Penghargaan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Berprestasi - Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Kemandirian; Pelaksanaan Launching Program Bekerja, Agricamp dan UPSUS Mendukung PWMP; (n) Launching POLBANGTAN Dalam Rangka Penguatan PWMP.



Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian

- Siswa yang mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP Bantuan praktek Siswa

Untuk mendukung Kinerja Siswa yang mengikuti Pendidikan menengah Pertanian di SMK-PP dilakukan Kinerja Fasilitasi Bantuan Praktek Siswa SMK.





Sebanyak 76 Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) berkumpul dan menggelar Rapat Teknis Menengah Pertanian 2019

 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Kawasan Pertanian.

Dalam rangka penguatan sinergis antara arah kebijakan BNPP dengan BPPSDMP, dilakukan kerjasama antara Pusat Pendidikan Pertanian dengan Kedeputian Potensi Kawasan Perbatasan Darat untuk membangun sumber daya manusia pertanian di wilayah perbatasan melalui Kinerja Pengandian kepada Masyarakat dan Praktik Kerja Lapang. Kinerja ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Politeknik Pembanguan Pertanian, yang dilaksanakan di 3 wilayah perbatasan darat yaitu ; Kalimnatan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Secara operasional Pengabdian kepada Masyarakat dilksanakan oleh dosen dan/atau Mahasiswa Politeknik Pembanguan Pertanian, sedangkan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan oleh Mahasiswa Polbangtan dengan bimbingan Dosen Polbangtan bekerja sam dengan Penyuluh Pertanian dan petugas pemerintah setempat. Adapun Polbantanga yang melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah : Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor,

Polbangtan Yogya – Magelang Satker DIY, Polbangtan malang, Polbangtan Gowa dan Polbangtan Manokwari.



Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian dan BNPP Kementerian Dalam Negeri susun juklak Kinerja peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi melalui pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan praktik kerja lapang di wilayah perbatasan tahun 2019

- Penajaman Kompetensi SDM Pertanian

Guna menciptakan lulusan SMK-PP yang kompetensi dan dapat bersaing di Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dilakukan sertifikasi terhadap siswa SMK-PP. Tahun 2019 pelaksanaan sertifikasi ditujukan untuk siswa SMK-PP yang tersebar di 11 SMK-PP binaan yaitu : SMK-PP Pelaihari; SMK-PP Tanjungsari; SMK-PP Peternakan Negeri Lembang; SMK-PP H. Moenadi Ungaran; SMK-PP Negeri 1 Plosoklaten Kediri; SMK-PP Negeri Saree Aceh; SMK-PP Negeri Mataram; SMK-PP Negeri Tegalampel Bondowoso; SMK-PP Negeri Padang Mangatas; SMK-PP Negeri 63 DKI Jakarta dan SMK-PP Negeri Lembang. Keluaran Kinerja sertifikasi ini adalah tersertifikasinya siswa SMK-PP sebanyak 1625 orang

- Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan

Untuk mendukung Kinerja Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan dilakukan Kinerja sebagai berikut : (1) Koordinasi Teknis Pendidikan Pertanian; (2) Profesionalisme Staff; (3) Persiapan dan Perumusan Program dan Anggaran 2019; (4) Evaluasi Program Pendidikan Pertanian: (5) Penyusunan LAKIP dan LAPTAH; (6) Administrasi Pendidikan dan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (7) Penyusunan Jurnal Teknologi dan penyempurnaan Dokumen Profil UPT menuju Politeknik; (8) Koordinasi Pimpinan; (9) Pembinaan dan Pengawalan Program, Anggaran dan Kinerja 2019; (10)Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan Pertanian; (11) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kinerja Pendidikan Pertanian Tahun 2019; (12) Penyusunan SBK Pendidikan 2019; (13) Pertukaran Pendidik dan Tenaga kependidikan ke luar negeri; (14) Retooling (Permagangan) di perkebunan Kelapa sawit; (15) Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri; (16) Pengembangan Kerjasama luar negeri; (17) Pertukaran Guru dan Dosen ke Luar Negeri: (18) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; (19) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan; (20) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Bidang Perkebunan; (21) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertanian; (22) Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Pertanian; (23) Pedoman Penyusunan Pendidikan Tinggi Pertanian (24) Pengembangan Kurikulum Politeknik Pembangunan Pertanian; (25) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengawalan Ujian dan Wisuda; (26) Dukungan Pendidikan Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan Strategis; (27) Penerimaan Mahasiswa Baru; (28) Pembinaan Kehidupan Kampus; (28) Pembinaan Generasi Muda Melalui Sakatarunabumi; (29) Transformasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi dan Menengah Pertanian; (30) Penjaminan Mutu Pendidikan; (31) Pembinaan Penerapan Teaching Factory; (32) Penilaian dan Penatapan Angka Kredit Guru, Dosen dan PLP; (33) Magang Bagi Tenaga Pendidi Pertanian; (34) Fasilitasi Tenaga Kependidikan Dalam

memperkuat Dosen Vokasi Pertanian; (35) Penguatan Penelitian Terapan Dosen Vokasi ke Arah Transformasi; (36) Fasilitasi Penguatan Dosen Vokasi se Indonesia; (37) Magang Bagi Tenaga Kependidikan; (38) Persiapan Progran YESS-IFAd; (39) Pelatihan Alsintan Wilayah Korem 074 dan Korem lainnya.

Dalam rangka memperoleh calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan maka Polbangtan melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru pendidikan vokasi Program Diploma III (DIII) dan Diploma IV (DIV).

Pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) yang bersinergi dengan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian bertujuan untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi guna melahirkan sumber daya manusia terampil yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu agar mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan muda.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) di kawasan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan), Serpong, Tangerang.



Peletakan Batu Pertama Pembangunan PEPI oleh Menteri Pertanian.

 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani

Program ini kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Progran YESS di tingkat Provinsi dilakukan oleh *Provincial Project Implemention Unit* (PPIU) yang terdapat di Polbangtan (Bogor, Malang dan Gowa) serta SMK-PP Banjarbaru. PPIU terdiri dari Project Manager, bidang program, bidang keuangan, bidang Monitoring dan Evaluasi, serta *District Liason Officer* (DLO) atau penghubung ke setiap kabupaten. Istandi terkit tingkat provinsi antara lain; Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, lembaga Keuangan, KADIN, dll.

Pelaksanaan Kinerja di tingkat kabupaten akan dibantu oleh *District Implementation Team (DIT)* yang dibentuk pada Dinas yang menangani pertanian, terdiri dari Koordinator Pelaksana, Asisten Bidang Program, Asisten Bidang Keuangan, dan Asisten Bidang Monitoring dan Evaluasi. Disamping itu juga dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten (*District Coordination Team = DCT*) yang diketuai oleh BAPPEDA, dengan anggota adalah Dinas terkait (Pertanian, Koperasi dan UKM, Pemuda dan Olahraga, Ketenagakerjaan, KADIN, Lembaga Keuangan, dan organisasi/LSM kepemudaan.



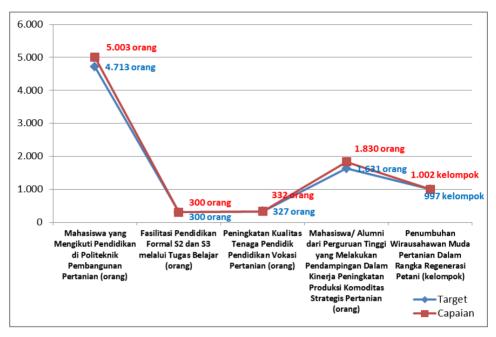
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meluncurkan program pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian Youth Enterpreneurship and Employment Support Services Programme atau yang dikenal YESS Program di Jakarta,

Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian (Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian) tahun 2019 pada umumnya tercapai rata-rata mencapai 104,08%. Secara rinci realiasi kinerja Pusat Pendidikan Pertanian pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel.10 berikut:

Tabel 10.

Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian (Mahasiswa yang
Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian)

No	Output	Target	Capaian	%
1	Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian (orang)	4.713	5.003	106,15
2	Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar (orang)	300	300	100,00
3	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Pendidikan Vokasi Pertanian (orang)	327	332	101,53
4	Mahasiswa/ Alumni dari Perguruan Tinggi yang Melakukan Pendampingan Dalam Kinerja Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian (orang)	1.631	1.830	112,20
5	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani (kelompok)	997	1.002	100,50



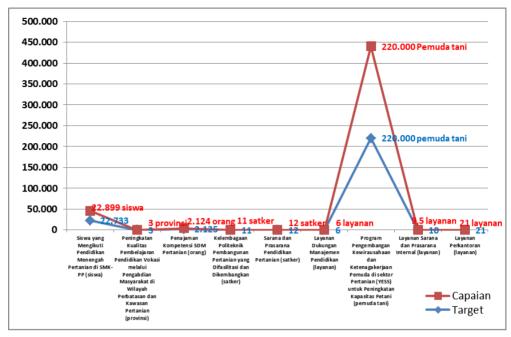
Gambar 10. Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian Mahasiswa yang Mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian Pertanian

4) Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian (Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (siswa))

Capaian Kinerja Capaian Anggaran Pendidikan Pertanian (Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (siswa)) tahun 2019 pada umumnya tercapai rata-rata mencapai 100,00%. Secara rinci realiasi Kinerja Capaian Anggaran Pendidikan Pertanian (Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (siswa)) pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel.11 berikut:

Tabel 11.
Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian (Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (siswa))

No	Output	Target	Capaian	%
1	Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (siswa)	22.733	22.899	100,73
2	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Kawasan Pertanian (provinsi)	3	3	100,00
3	Penajaman Kompetensi SDM Pertanian (orang)	2.125	2.124	99,95
4	Kelembagaan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (satker)			100,00
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (satker)	12	12	100,00
6	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan (layanan)	6	6	100,00
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani (pemuda tani)		220.000	100,00
8	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)	10	9,5	95,00
9	Layanan Perkantoran (layanan)	21	21	100,00



Gambar 11. Capaian Kinerja Pendidikan Pertanian Pertanian (Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (siswa)

5) Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya didukung oleh beberapa Kinerja, yaitu:

- Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan penyusunan rencana dan program, (b) program kerjasama; dan (b) penyiapan penyusunan anggaran.
- 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam 3 Renstra Sekretariat Badan PPSDMP 2015 - 2019 melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: (a)

- pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM); (b) pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan (c) pelaksanaan urusan perlengkapan.
- Bagian Umum Bagian Umum mempunyai tugas penyusunan 3) rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan organisasi dan penyempurnaan tata laksana. serta pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (b) pelaksanaan urusan kepegawaian; dan (c) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Koordinasi Penerapan Aplikasi Di

4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data-informasi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan pertanian, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan data, penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; (b) penyiapan laporan pelaksanaan Kinerja dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan (c) penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

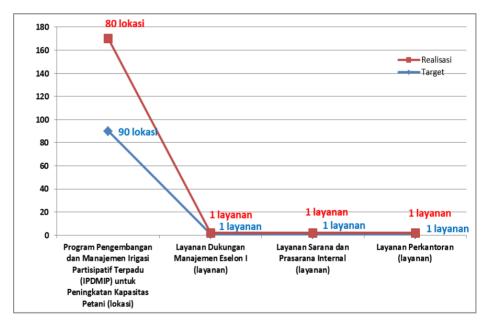


Kegiatan Rapim Badan PPSDMP TA 2019

Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2019 pada Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani (lokasi) 88,89% tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2019 ada 10 lokasi IPDMIP yang tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan IPDMIP (tidak ada DIPA tahun 2019) sehingga tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Secara rinci Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dapat dilihat pada Tabel.12 berikut:

Tabel. 12
Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

No	Output	Target	Capaian	%
1	Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani (lokasi)	90	80	88,89
2	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (layanan)	1	1	100,00
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)	1	1	100,00
4	Layanan Perkantoran (layanan)	1	1	100,00



Gambar 12. Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Berdasarkan capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2019, maka dapat diketahui capaian tingkat efisiensi (rasio *output* yang dicapai dengan input/anggaran yang digunakan), baik secara global maupun secara parsial menurut masing-

masing eselon II lingkup Badan PPSDMP. Tingkat efisiensi tersebut disajikan pada Tabel 13. berikut ini.

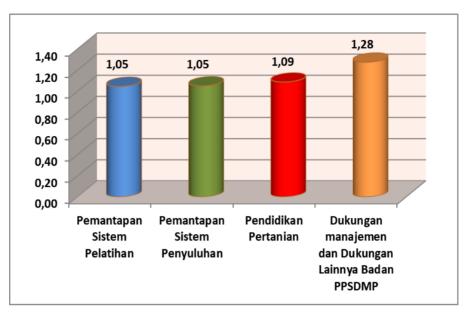
Tabel 13.

Tingkat Efisiensi Kegiatan Badan PPSDMP Tahun 2019

NO	Keterangan	Realisasi Keuangan (%) (I)	Rata-rata Realisasi Fisik (%) (0)	Tingkat Efisiensi (O/I)
1.	Pusat Pelatihan			
	Pertanian	95,56	100,00	1,05
2.	Pusat Penyuluhan			
	Pertanian	95,10	100,00	1,05
3.	Pusat Pendidkan			
	Pertanian	91,97	100,00	1,09
4.	Dukungan Manajemen			
	dan Dukungan Teknis			
	Lainnya Badan	78,35	100,00	1,28
	PPSDMP			

Berdasarkan Tabel 18. diatas, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan capaian tingkat efisiensi kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2019, maka capaian tingkat efisiensi pada keempat eselon II lingkup BPPSDMP pada tahun 2019 juga termasuk pada kategori efisien, karena seluruhnya mencapai nilai rasio lebih dari 1, yaitu

- a. 1,05 pada kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
- b. 1,05 pada kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian;
- c. 1,09 pada kegiatan Pendidikan Pertanian;
- d. 1,28 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP.



Gambar 13. Tingkat Efisiensi Kegiatan Badan PPSDMPTahun 2019

C. Perkembangan Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2015 – 2020 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

a. Capaian Realisasi Anggaran tahun 2015 sampai dengan 2019

Capaian realisasi anggaran tahun 2015 sampai dengan 2019 pada umumnya tercapai akan tetapi pada tahun 2018 dan tahun 2019 realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan dukungan Lainnya Badan PPSDMP tidak memuaskan dikarenakan pada tahun 2018 dan 2019 dikarenakan:

- Pengadaan yang sering gagal lelang atau peminat yang sedikit sehingga harus dilakukan lelang ulang sedangkan waktu terus berjalan
- Kurangnya komitmen pimpinan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk Kinerja IPDMIP
- Pergantian pelaksana Kinerja di daerah yang sering terjadi dalam satu tahun sehingga perlu pemahaman kembali terhadap pedoman pelaksanaan
- Kinerja Sekolah Lapang belum semua lokasi dapat melaksanakan

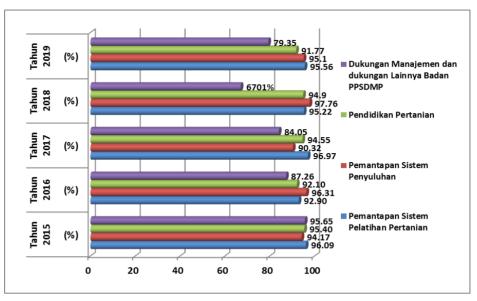
karena dilanda musim kekeringan sehingga tidak ada air, dan saluran irigasi yang belum direhab.

• Provinsi yang belum melakukan pengadaan benih dikarenakan harus melakukan revisi di DPA Perubahan.

Secara rinci Capaian Realisasi Anggaran tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Tabel.14 berikut:

Tabel. 14
Capaian Realisasi Anggaran tahun 2015 sampai dengan 2019

NO	Program	Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	96,09	92.90	96.97	95,22	95,56
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan	94.17	96.31	90.32	97,76	95,10
3	Pendidikan Pertanian	95.40	92.10	94.55	94.90	91,77
4	Dukungan Manajemen dan dukungan Lainnya Badan PPSDMP	95.65	87.26	84.05	67,01	79,35



Gambar 14. Capaian Realisasi Anggaran tahun 2015 – 2019

BAB IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2019 adalah pada masing-masing kegiatan utama secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian

Dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian selama tahun 2019, permasalahan yang dihadapi dalam pemantapan sistem penyuluhan pertanian sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perhitungan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) masih menggunakan jumlah Penyuluh Pertanian dalam kurun waktuberjalan dan belum memperhitungkan jumlah penyuluh yang purna tugas (pensiun). Kondisi ini menyebabkan sisa anggaran BOP (PNS dan CPNS) tahun 2019 sebesar Rp. 13.933.975.200 (10,47%) dari total anggaran yang disediakan. Sedangkan BOP bagi THL-TB PP sisa anggaran sebesar 5,3% atau Rp. 2.752.970.706;
- 2) Perpindahan Penyuluh Pertanian antar WKPP mengakibatkan perubahan administrasi pembayaran BOP dan honor serta terhambatnya penilaian kelas kemampuan poktan.;
- 3) Rekomendasi untuk pembayaran BOP Penyuluh PNS dan THL-TB PP dari Dinas Pertanian kabupaten/Kota masih terlambat;
- 4) THL-TB PP di beberapa provinsi telah mengundurkan diri;
- 5) Keterlambatan laporan data CPCL kegiatan SL dari Propinsi ke pusatl;
- 6) Tidak ada juklak/juknis/SOP yang disusun oleh provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan pelaksanaan kegiatan SL di lapangan;
- 7) Fasilitasi dan sosialisasi kepada calon Penyuluh Pertanian Swadaya melalui pelaksanaan kegiatan demplot belum optimal (tujuan, sasaran yang terlibat serta output dicapai);
- 8) Keterlambatan laporan capaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan Penumbuhan Penyuluh Swadaya dari Propinsi ke Pusat;

- 9) Kurangnya kesiapan masing- masing kelembagaan petani terutama dari aspek badan hukum yang akan ditumbuhkembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
- 10) Perbedaan pemahaman pelaksanaan adaptasi teknologi antara pemangku kepentingan;
- 11) Tidak ada juklak/juknis/SOP yang disusun oleh provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Adaptasi Teknologi.

2. Pusat Pendidikan Pertania

Permasalahan serapan anggaran selama pelaksanaan program dan kegiatan Pusdiktan Tahun 2019 yaitu (1) adanya revisi anggaran terkait Kurang tertibnya administrasi keuangan; (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur dari jadwal yang telah ditetapkan

3. Pusat Pelatihan

- Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI rendah dikarenakan kegiatan baru mulai efektif dilaksanakan mulai awal Agustus 2019. Pengadaan Konsultan untuk pengelolaan Program READSI masih dalam tahap pengadaan di ULP untuk mencari calon konsultan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Akan dilakukan review terhadap teknis perekrutan konsultan di tahun 2019;
- Tidak adanya perbaikan dalam proses perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan, cermat memilih lokasi kegiatan pelaksanaan;
- Kurangnya koordinasi dalam penjadawalan kegiatan antara bbidang lingkup Pusat Pelatihan Pertanian;
- d. Tidak dilakukannya pelaksanaan pengendalian internal lingkup Pusat Pelatihan Pertanian secara periodic atau pertriwulan, mulai dari perencanaan dan perancangan kegiatan, supervise dan monitoring kegiatan dan Pelaporan;

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

- Penerapan e-planning dalam perencanaan program dan anggaran masih belum konsisten;
- 2) Kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik belum prima;
- 3) Efektivitas dan akuntabilitas kegiatan, serta pengendalian internal masih rendah:
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pegawai belum sepenuhnya optimal dan berkesinambungan;
- 5) Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya belum optimal.

B. Upaya Tindak Lanjut

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan kendala tersebut akan ditempuh upaya sebagai berikut:

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

- 1) Perencanaan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi PP PNS dan THLTB-PP agar dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan jumlah penyuluh yang akan pensiun pada tahun berjalan sehingga memperkecil sisa anggaran pada tahun berjalan di masing-masing provinsi Perlu dilakukan verifikasi dan validasi Data Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB PP secara intentif dan berkala Proses pembayaran BOP bagi Penyuluh PNS dan THL-TBB dilakukan setiap bulan;
- 2) Pusat Penyuluhan Pertanian bersurat kepada Dinas Pertanian yang menangani fungsi penyuluhan agar tidak dialih tugaskan ke jabatan lain yang setara guna mendukung kinerja penyuluhan pertanian;
- Provinsi dan kab./kota didorong membangun aplikasi untuk memantau kinerja penyuluh pertanian sehingga pembayaran BOP tepat waktu;
- 4) Bidang yang menangani ketenagaan di Pusat, provinsi dan kab/kota secara rutin melakukan updating, verifikasi dan validasi data THL-TB PP kedalam aplikasi Simluhtan;
- 5) Data CPCL Kegiatan Sekolah Lapangan agar disusun pada T-1 kegiatan berjalan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) sehingga tidak berubah pada saat kegiatan akan dilaksanakan;

- 6) Perlu dibuat juklak/juknis/SOP Sekolah Lapangan yang disusun oleh provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan pelaksanaan kegiatan SL di lapangan;
- 7) Perlu dilakukan sosialisasi/bimtek kepada calon Penyuluh Pertanian Swadaya tentang tujuan, sasaran yang terlibat dan output yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan demplot;
- 8) Penanggungjawab satker dana dekonsentrasi di provinsi segera menyelesaikan laporan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Swadaya dalam aplikasi;
- 9) Perlu dilakukan bimbingan teknis kepada penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan kegiatan penumbuhan dan pengembangan korporasi;
- 10) Agar dilakukan sosialisasi kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian melalui Dana Dekonsentrasi secara berjenjang kepada penanggung jawab teknis kegiatan, penyuluh pertanian serta poktan;
- 11) Perlu dibuat Petunjuk teknis/SOP kegiatan adaptasi teknologi oleh bidang teknis yang menangani serta ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk lapangan (petlap)/oleh provinsi dan kabupaten/kota.

2. Pusat Pendidikan Pertanian

Menyikapi kondisi tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah : (1) Dispilin pelaksanaan program kegiatan dengan mengacu kepada jadwal palang yang telah ditetapkan (2) disiplin proses administrasi keuangan, sehingga cepat tercatat pada data SPAN – aplikasi SAS.

3. Pusat Pelatihan Pertanian

- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI realisasi rendah dikarenakan kegiatan baru mulai efektif dilaksanakan mulai awal Agustus 2019. Pengadaan Konsultan untuk pengelolaan Program READSI masih dalam tahap proses pengadaan di ULP untuk mencari calon konsultan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Akan dilakukan review terhadap teknis perekrutan konsultan di tahun 2019;
- f. Akan melakukan perbaikan dalam proses perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan sesuai dengan

- jadwal kegiatan, cermat memilih lokasi kegiatan pelaksanaan;
- g. Meningkatkan koordinasi dalam penjadawalan kegiatan antarabbidang lingkup Pusat Pelatihan Pertanian;
- h. Melakukan pelaksanaan pengendalian internal lingkup Pusat Pelatihan Pertanian secara periodic atau pertriwulan, mulai dari perencanaan dan perancangan kegiatan, supervise dan monitoring kegiatan dan Pelaporan;

4. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya.

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang antisipasi dalam menghadapi adanya kebijakan penghematan;
- Melakukan upaya pengendalian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih terdapat kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan PNBP pada satker Badan PPSDMP;
- c. Renstra, RKT dan PK perlu ditelaah kembali dan disinkronkan dalam LAKIP;
- d. Memperkaya analisis hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat memberikan penjelasan/alasan strategis faktor keberhasilan atau kegagalan dan memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan;
- e. Melakukan pemantauan PK secara periodik dan mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi antara bagian yang menangani perencanaan, bagian yang menangani evaluasi dan pelaporan
- f. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkup BPPSDMP dan UPT, maka direkomendasikan agar 1) Meningkatkan kinerja Tim Satlak PI; 2) Perlu adanya "knowledge sharing" tentang SPI dengan melibatkan narasumber dari luar seperti Tim Pembina SPI (Itjen, BPK, BPKP); 3) Perlu sosialisasi dan forum-forum dengan melibatkan seluruh pegawai; 4) Memasukkan kinerja satlak PI dalam kontrak kinerja pimpinan/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- g. Dalam rangka mengoptimalkan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Lembaga Auditor (Itjen, BPK, BPKP)

direkomendasikan agar: (1) penelusuran kerugian negara pada satker baru melalui forum pertemuan dengan pendampingan Itjen Kementan dan BPKP Pusat; (2) mengirimkan surat Gubernur/Bupati/Walikota pemberitahuan kepada untuk memfasilitasi penyelesaian temuan Kerugian Negara pada Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan sulit vang ditindaklanjuti; (3) pembinaan melalui kegiatan kunjungan pada satker yang terdapat temuan yang belum tuntas; (4) membuat surat edaran Kepala Badan kepada pimpinan satker tentang temuan – temuan baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat segera menindaklanjuti hingga tuntas; (5) sosialisasi ke satker tentang peraturan jangka waktu penyelesaian hasil pemeriksaan; (6) memberikan saran ke satker lingkup Badan PPSDMP tentang penetapan sanksi administrasi berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 kepada penyebab kerugian negara atau instansi dan pimpinan satkernya vang tidak membantu/berupaya penagihan penyelesaian untuk atau kerugian negara tersebut.

 Dilakukan pelaksanaan Pengendalian Intern lingkup Badan PPSDMP secara periodik, dimulai dengan penetapan dan pengukuhan Satlak, sosialisasi maturitas, dan gratifikasi, supervisi dan pembinaan;

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan realisasi kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2019, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

 Realisasi anggaran kegiatan Badan PPSDMP pada Pusat Pelatihan dan sekretariat Badan PPSDMP tahun 2019 tidak tercapai dengan maksimal dikarenakan antara lain pada:

1) Pusat Pelatihan

- a. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI realisasi rendah dikarenakan kegiatan baru mulai efektif dilaksanakan mulai awal Agustus 2019. Pengadaan Konsultan untuk pengelolaan Program READSI masih dalam tahap proses pengadaan di ULP untuk mencari calon konsultan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Akan dilakukan review terhadap teknis perekrutan konsultan di tahun 2019;
- b. Akan melakukan perbaikan dalam proses perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan, cermat memilih lokasi kegiatan pelaksanaan;
- c. Meningkatkan koordinasi dalam penjadawalan kegiatan antarabbidang lingkup Pusat Pelatihan Pertanian;
- d. Melakukan pelaksanaan pengendalian internal lingkup Pusat Pelatihan Pertanian secara periodic atau pertriwulan, mulai dari perencanaan dan perancangan kegiatan, supervise dan monitoring kegiatan dan Pelaporan;

2) Sekretariat Badan PPSDMP

Realisasi rendah dikarenakan ada pagu sebesar Rp.6.295.681.000 di blok untuk sub komponen kegiatan Anggaran penyesuaian tunjangan kinerja Badan PPSDMP. Selain itu pada Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani, sekitar 60% anggaran PHLN

untuk pengadaan konsultan, belum semuanya pengadaan Konsultan Internasional dan Konsultan Firma terealisasi. Pengadaan konsultan juga harus melalui ULP Kementan dan persetujuan (NOL) dari IFAD, akan dilanjutkan di tahun 2019.

2. Secara parsial berdasarkan kegiatan, realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Pusat Penyuluhan sebesar **89,74%**, dan realisasi yang terendah dicapai oleh Sekretariat Badan PPSDMP sebesar **78,35%**.

Rata-rata realisasi fisik kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2019, secara keseluruhan mencapai **100,00%**.

NO	Keterangan	Realisasi Keuangan (%) (I)	Rata-rata Realisasi Fisik (%) (0)	Tingkat Efisiensi (O/I)
1.	Pusat Pelatihan			
	Pertanian	95,56	100,00	1,05
2.	Pusat Penyuluhan			
	Pertanian	95,10	100,00	1,05
3.	Pusat Pendidkan			
	Pertanian	91,97	100,00	1,09
4.	Dukungan Manajemen			
	dan Dukungan Teknis			
	Lainnya Badan	78,35	100,00	1,28
	PPSDMP			

3. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan (anggaran) yang dicapai, maka capaian tingkat efisiensi kegiatan Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2019 tergolong efisien dengan nilai rasio lebih dari 1, yakni 1,28.

Secara parsial berdasarkan masing-masing unit kerja, maka capaian tingkat efisiensi pada keempat eselon II lingkup Badan PPSDMP pada tahun 2019 juga termasuk kategori efisien, karena seluruhnya mencapai nilai rasio lebih dari 1, yaitu masing-masing (a) 1,05 pada kegiatan pusat Pelatihan Pertanian; (b) 1,05 pada kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian; (c) 1,09 pada Sekretariat Badan; dan (d) 1,28 pada kegiatan Pusat Pendidikan Pertanian.

4. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2019 meliputi: tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal (100%) antara lain karena perencanaan anggaran kurang cermat; belum dapat mengidentifikasi dengan baik terkait dengan rapat-rapat koordinasi; adanya efisiensi proses pengadaan; serta terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan karena waktunya di akhir, sehingga tidak cukup untuk pengurusan administrasi.

B. Saran

Perbaikan ke depan sebagai langkah antisipasi menyikapi permasalahan yang terjadi di tahun 2019 antara lain:

- 1. Lebih cermat dalam proses perencanaan (lokasi, SDM);
- 2. Lebih cermat dalam memperkirakan kegiatan yang bersifat koordinasi baik internal maupun eksternal;
- 3. Lebih cermat dalam merancang kegiatan pengadaan dan menepati jadwal proses pengadaan, lebih disiplin baik lokasi maupun waktu pelaksanaan kegiatan;
- 4. Meningkatkan koordinasi yang lebih dalam penjadwalan kegiatan antar bagian lingkup BPPSDMP;
- 5. Lebih selektif dalam mengundang peserta; lebih cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga;
- 6. Lebih intensif dalam pengendalian internal.

BAB VI PENUTUP

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian memiliki fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Tahun 2019, fungsi tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian serta Program Pendidikan Menengah Pertanian. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (4) Pusat Pendidikan Pertanian; serta (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Realisasi serapan anggaran program dan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2019, secara menyeluruh mencapai 92.54%, yaitu sebesar Rp 1,483,336,384,991,- dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp 1,602,896,004,000,-

Pencapaian realisasi fisik kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2019 adalah sebesar pada kisaran 88,89% - 100.00% Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut Badan PPSDMP didukung oleh satker Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lain juga menjadi salah satu faktor kunci pencapaian kegiatan pada tahun 2019 dalam pelaksanaan setiap kegiatan utama mempunyai permasalahan/kendala dan telah direkomendasikan tindak lanjut yang dapat dilakukan sebagai solusi permasalahan tersebut. Hal hal yang disampaikan dalam Laporan Tahunan ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan PPSDMP

Lampiran 2. Data Kepegawaian Badan PPSDMP

Lampiran 3. Data Jabatan Fungsional